

**ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN
PEMERINTAH DI SEKTOR PERTANIAN,
PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN
INFRASTRUKTUR TERHADAP TINGKAT
KEMISKINAN (STUDI KASUS DI
KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA
TENGAH)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada
Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh

MOHAMAD ERHAN WIBOWO

NIM. C2B009099

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2014

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Mohamad Erhan Wibowo

Nomor Induk Mahasiswa : C2B009099

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/ IESP

Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN
PEMERINTAH DI SEKTOR PERTANIAN,
PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN
INFRASTRUKTUR TERHADAP
TINGKAT KEMISKINAN (STUDI KASUS
DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA
TENGAH)**

Dosen Pembimbing : Dr. Hadi Sasana, S.E., M.Si.

Semarang, 30 September 2014

Dosen Pembimbing,

(Dr. Hadi Sasana, S.E., M.Si.)

NIP.196901211997021001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Mohamad Erhan Wibowo

Nomor Induk Mahasiswa : C2B009099

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/ IESP

Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN
PEMERINTAH DI SEKTOR PERTANIAN,
PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN
INFRASTRUKTUR TERHADAP
TINGKAT KEMISKINAN (STUDI KASUS
DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA
TENGAH).**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 30 September 2014

Tim Penguji:

1. Dr. Hadi Sasana, S.E., M.Si. ()
2. Dr. Nugroho SBM.,M.Si ()
3. Achma Hendra Setiawan, S.E., M.Si ()

Mengetahui
Pembantu Dekan I

**Anis Chariri, SE., M.Com., Ph.D., Akt.
NIP 196708091992031001**

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Mohamad Erhan Wibowo, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pertanian, Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah), adalah tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan universitas batal saya terima.

Semarang, 30 September 2014

Yang Membuat Pernyataan,

(Mohamad Erhan Wibowo)

NIM. C2B009099

ABSTRAKSI

Desentralisasi fiskal merupakan sebuah konsep dalam otonomi daerah untuk mengatur kemandirian suatu daerah. Walaupun pemerintah daerah diberi kewenangan dan keleluasaan untuk mengelola dan mengatur daerahnya sendiri, tetapi pemerintah provinsi Jawa Tengah belum berhasil menangani masalah kemiskinan. Hal ini dapat dilihat selama periode tahun 2007 sampai tahun 2012 rata-rata tingkat kemiskinan di Jawa Tengah relatif lebih tinggi bila dibandingkan dengan lima provinsi yang lainnya di wilayah pulau Jawa, yaitu menempati peringkat pertama. Namun jika dilihat dari alokasi pengeluaran pemerintah daerah terutama di sektor pertanian, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dari tahun ke tahun menunjukkan trend yang meningkat.

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah atas pertanian, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur terhadap tingkat kemiskinan pada 35 Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Tengah. sebanyak Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel (data time series 6 tahun dari tahun 2007-2012 dan data cross section sebanyak 35 data mewakili Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang menghasilkan 210 observasi). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linear berganda (*Pooled Least Square Regression Analysis*) dengan menggunakan pendekatan efek tetap (*Fixed Effect Model*).

Berdasarkan hasil estimasi, pengeluaran pemerintah sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemiskinan. Sedangkan pengeluaran sektor infrastruktur berpengaruh signifikan positif terhadap kemiskinan.

Kata Kunci : Tingkat kemiskinan, pengeluaran pemerintah sektor pertanian, pendidikan, kesehatan, infrastruktur.

ABSTRACT

Fiscal decentralization in regional autonomy is a concept to regulate self-reliance an area. Although the government has district is given the authority and to manage and regulates the scope of our own country, but the government of central java not successfully handle the problem of poverty. This can be seen during the period 2007 until 2012 average the level of poverty in central java relatively higher compared to five provinces, is on the island of java that is occupying the first rank. But if viewed from an allocation of government spending a region especially in the agricultural sector, education, health and infrastructure from year to year showed an being increased.

This research aimed at analyzing the influence of government spending on agriculture, education, health and infrastructure against the level of poverty in the in 35 district in central java province. The data used in this research is data panel (the data time series 6 years from 2007 until 2012 year and data cross section 35 data represent district in central java province that produces 210 observation). A method of analysis used in this research is a method of analysis linear regression worship of idols (pooled least square regression analysis) by using approach the effects of fixed (fixed effect model).

Based on the estimate, the government spending agricultural, education, and health sector influential significant negative against the poverty levels. While expenditure the infrastructure sector influential significant positive against poverty.

Keywords: poverty, government spending on agricultural, education, health and infrastructure sectors.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah Segala Puji Syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, taufik serta hidayah serta inayah-Nya, sampai saat ini penulis masih diberikan bermacam kenikmatan yang tak ternilai harganya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pertanian, Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Shalawat dan salam selalu penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, serta saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih :

1. Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah dan inayah-Nya kepada penulis.
2. Bapak Prof. Drs. H. Mohammad Nasir, M.Si, Akt, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
3. Dr. Hadi Sasana, S.E, M.Si, selaku Dosen Pembimbing serta Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan, motivasi, masukan-masukan, nasehat, dan saran yang sangat berguna bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen dan Staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.
5. (Alm) Bapak Rokib, Ibunda tersayang Sofiyah, atas segala curahan kasih sayang, untaian doa dan motivasi yang tiada henti dan sangat besar yang tak ternilai harganya bagi penulis. Terima kasih atas semua yang engkau berikan.

6. Kakak-kakakku tersayang : Pakhruri, Asiyah, Arisah, Siti Hartati, Azis Soleh yang selalu mendorong dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan studi.
7. Petugas perpustakaan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah yang telah banyak membantu penulis dalam perolehan data.
8. Keluarga besar IESP FE UNDIP 2009, Fuad, Sofyan, Taufik, Dhanu, Adhit, Akbar, Yudi, dkk, yang telah menemani penulis disaat susah dan senang selama ini. Terima kasih untuk persahabatan kalian.
9. Teman KKN Desa Donorojo Kecamatan Tegalrejo (Vandi, Aji,Vian, Faisol, Lilin, Nana, Novi), Kenangan manis bersama kalian tidak terlupakan (Tiga puluh lima hari bersama menjadi saudara, kita tetap saudara).
10. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penulisan Skripsi ini.

Akhirnya penulis ikut mendo'akan semoga semua amal kebaikan pihak-pihak sebagaimana tercantum diatas mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Dengan segala kerendahan hati kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan untuk perbaikan dan pencapaian hasil yang lebih baik di masa yang akan datang. Mudah-mudahan skripsi ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi dalam penelitian sejenis.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 30 September 2014

Penulis,

(Mohamad Erhan Wibowo)

NIM C2B009099

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
ABSTRAKSI	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	16
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	18
1.4 Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu	22
2.1.1 Otonomi Daerah	22
2.1.2 Pengertian dan Konsep Desentralisasi Fiskal	23
2.1.3 Konsep dan Definisi Kemiskinan	26
2.1.3.1 Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan	29
2.1.4 Peran dan Campur Tangan Pemerintah dalam Perekonomian	32
2.1.4.1 Teori Pengeluaran Pemerintah	33
2.1.5 Gambaran Umum APBD	38
2.1.5.1 Klasifikasi Pengeluaran Pemerintah	40
2.1.6 Pengeluaran Pemerintah Sektor Pertanian	41
2.1.7 Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan	42
2.1.8 Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan	44
2.1.9 Pengeluaran Pemerintah Sektor Infrastruktur	44
2.2 Penelitian Terdahulu	45
2.3 Kerangka Pemikiran	53
2.4 Hipotesis	55
BAB III METODE PENELITIAN	57
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	57
3.2 Jenis dan Sumber Data	59
3.3 Metode Pengumpulan Data	60
3.4 Metode Analisis	61
3.4.1 Deteksi Penyimpangan Asumsi Klasik	64
3.4.1.1 Deteksi Normalitas	65
3.4.1.2 Deteksi Multikolinearitas	67
3.4.2 Pengujian Model	67
3.4.2.1 Uji Hausman	68

3.4.2.2 Uji Chow Test	68
3.4.2.3 Koefisien Determinasi (R^2)	69
3.4.2.4 Uji Signifikasi Individual (Uji t)	70
3.4.2.5 Uji Signifikan Simultan (Uji-F)	71
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	73
4.1 Deskripsi Obyek Penelitian	73
4.1.1 Keadaan Geografi	73
4.1.2 Perkembangan Tingkat Kemiskinan	74
4.1.3 Perkembangan Pengeluaran Sektor Pertanian	69
4.1.4 Perkembangan Pengeluaran Sektor Pendidikan	78
4.1.5 Perkembangan Pengeluaran Sektor Kesehatan	81
4.1.6 Perkembangan Pengeluaran Sektor Infrastruktur	83
4.2 Analisis Data	86
4.2.1 Deteksi Penyimpangan Asumsi Klasik	86
4.2.1.1 Deteksi Normalitas	86
4.2.1.2 Deteksi Multikolinieritas.....	87
4.2.2 Fixed Effect Model.....	88
4.2.3 Pengujian Statistik.....	89
4.2.3.1 Koefisien Determinasi (R^2)	89
4.2.3.2 Uji t-Statistik	81
4.2.3.3 Uji F-Statistik	81
4.2.3.3 Uji Signifikan Simultan (Uji F)	91
4.2.4 Uji Ketepatan Model.....	92
4.2.4.1 Hausman Test	92
4.2.4.2 Uji Chow Test	93
4.3 Interpretasi Hasil dan Pembahasan	93
4.3.1 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah sektor Pertanian, Pendidikan, Kesehatan dan sektor Infrastruktur terhadap tingkat Kemiskinan Tahun 2007-2012.....	93
4.3.1.1 Pengeluaran Sektor Pertanian dan Kemiskinan.....	94
4.3.1.2 Pengeluaran Sektor Pendidikan dan Kemiskinan	95
4.3.1.3 Pengeluaran Sektor Kesehatan dan Kemiskinan	96
4.3.1.4 Pengeluaran Sektor Infrastruktur dan Kemiskinan	96
BAB V PENUTUP	98
5.1 Kesimpulan	98
5.3 Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN – LAMPIRAN	104

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Persentase Penduduk Miskin di Enam Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2007-2012	3
Tabel 1.2 Realisasi Pengeluaran Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007– 2012	7
Tabel 1.3 Perkembangan Pengeluaran Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007–2012	9
Tabel 1.4 Jumlah Pengeluaran Pembangunan untuk Investasi Pertanian, Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur di Kabupaten/Kota provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2012	13
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	50
Tabel 4.1 Proporsi Penduduk Miskin Di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 sampai Tahun 2012 (Dalam Persen)	76
Tabel 4.2 Pengeluaran Sektor Pertanian Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2007-2012 (dalam jutaan rupiah)	78
Tabel 4.3 Pengeluaran Sektor Pendidikan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2007-2012 (dalam jutaan rupiah).....	80
Tabel 4.4 Pengeluaran Sektor Kesehatan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2007-2012 (dalam jutaan rupiah)	82
Tabel 4.5 Pengeluaran Sektor Infrastruktur Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2007-2012 (dalam jutaan rupiah).....	85
Tabel 4.6 Uji Multikolinieritas	87
Tabel 4.7 Regresi Model Fixed Effect	88
Tabel 4.8 Uji-Model.....	91
Tabel 4.9 Hausman Test.....	92
Tabel 4.10 Chow Test	93

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Tingkat Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2012	4
Gambar 2.1 Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah menurut Wagner	36
Gambar 2.2 Teori Perkembangan Pengeluaran Pemerintah.....	38
Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran	55
Gambar 3.1 Uji Signifikansi Individual (Uji-t)	77
Gambar 4.1 Uji Normalitas	86

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A Data Mentah	105
Lampiran B Hasil Regresi Metode Pooled Least Square	112
Lampiran C Uji Asumsi Klasik.....	115

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia. Hal ini dikarenakan penerapan desentralisasi fiskal di Indonesia sudah berjalan lebih dari sepuluh tahun sejak disahkan UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999. Tetapi otonomi daerah dan desentralisasi fiskal baru diresmikan sejak tanggal 1 Januari 2001. Dengan diterapkan otonomi dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengelola penerimaan daerah dan melakukan peran alokasi secara mandiri dalam menentukan pembangunan ekonomi daerah. Penerapan desentralisasi fiskal tersebut pada hakekatnya harus mampu meningkatkan pemberdayaan dengan mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan yang dilaksanakan.

Konsekuensi dari pelimpahan sebagian wewenang pemerintahan dari pusat ke daerah otonom, tidak lain adalah penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut. Hal tersebut membuat konsep desentralisasi fiskal diperlukan sebagai instrumen dalam mendukung daerah dalam pelayanan publik dengan transfer dana ke daerah. Kebijakan desentralisasi fiskal sendiri bertujuan untuk memampukan keuangan daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam mencapai standar pelayanan minimum (Saragih, 2003).

Pemerintah pusat mengharapkan dengan pelimpahan wewenang dalam pengambilan keputusan dan tanggung jawab maka pemerintah daerah mempunyai peluang dan kesempatan yang lebih besar dalam menanggulangi kemiskinan. Pemerintah daerah dapat meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, karena lebih dekat dan dengan mudah memonitor dan mengevaluasi proyek apa saja yang kiranya tepat sesuai potensi masyarakat yang ada untuk menanggulangi kemiskinan di daerahnya.

Kebijakan desentralisasi fiskal memungkinkan daerah untuk dapat mengupayakan peningkatan kinerja ekonomi dengan kebijakan-kebijakan tertentu. Melalui pengenalan potensi baik ekonomi maupun non ekonomi yang dimiliki oleh suatu daerah, nantinya akan memberikan konsekuensi yang positif terhadap pembangunan ekonomi, sehingga kegiatan ekonomi akan dapat terus berkembang dan meningkat. Dengan demikian pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan pengentasan kemiskinan di daerah tersebut.

Permasalahan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah yaitu masih tingginya angka kemiskinan jika dibandingkan dengan provinsi lain di pulau Jawa. Oleh karena itu, kemiskinan menjadi tanggung jawab bersama baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, terutama bagi pemerintah daerah untuk menyangga proses perbaikan kehidupan masyarakat dalam sebuah pemerintahan, untuk segera mencari solusi untuk menanggulangi angka kemiskinan yang cukup tinggi.

**Tabel 1.1 Persentase Penduduk Miskin di Enam Provinsi di Pulau Jawa
Tahun 2007 - 2012 (dalam persen)**

No	Provinsi	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Rata-Rata
1	Jawa Timur	19,98	18,51	16,7	15,3	13,85	13,08	16,24
2	Jawa Tengah	20,43	19,23	17,48	16,11	16,21	14,98	17,41
3	Jawa Barat	13,55	13,01	12	11,3	10,57	9,89	11,72
4	D.I.Y	18,99	18,32	17,2	16,8	16,14	15,88	17,22
5	DKI Jakarta	4,61	4,29	3,6	3,5	3,64	3,7	3,89
6	Banten	9,07	8,15	7,6	7,2	6,26	5,71	7,33

Sumber : Susenas, BPS

Pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di enam provinsi di pulau Jawa dari tahun 2007 hingga tahun 2012. Rata-rata tingkat kemiskinan Jawa Tengah menempati posisi yang paling tinggi yaitu sebesar 17,41 persen. Diurutan kedua ditempati oleh provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan rata-rata tingkat kemiskinan sebesar 17,22 persen. Diurutan ketiga ditempati oleh provinsi Jawa Timur dengan rata-rata tingkat kemiskinan sebesar 16,24 persen. Diurutan keempat ditempati oleh provinsi Jawa Barat dengan rata-rata tingkat kemiskinan sebesar 11,72 persen. Dan diurutan kelima dan terakhir ditempati oleh provinsi Banten dengan rata-rata tingkat kemiskinan sebesar 7,33 persen dan 3,89 persen.

Tingkat kemiskinan di provinsi Jawa Tengah merupakan agregat dari tingkat kemiskinan dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Tingkat kemiskinan di kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah tidaklah merata. Dan sebagian besar tingkat kemiskinan masih tinggi. Maka dari itu, perlu dicari faktor-faktor yang menyebabkan tingkat kemiskinan yang terjadi di kabupaten/kota di provinsi Jawa

Tengah. Sehingga dapat digunakan sebagai acuan bagi tiap kabupaten/kota dalam usaha menanggulangi kemiskinan.

Sedangkan jika dilihat dari upaya penanggulangan kemiskinan di provinsi Jawa Tengah menunjukkan pengaruh yang positif. Hal ini terlihat dari tingkat kemiskinan yang cenderung mengalami penurunan dari tahun 2007 sampai tahun 2012. Pada tahun 2007 sampai tahun 2010 tingkat kemiskinan di provinsi Jawa Tengah selalu menurun yaitu dari 20,43 persen menjadi 16,11 persen pada tahun 2010. Namun pada tahun 2011 tingkat kemiskinan meningkat sebesar 0,10 persen. kemudian pada tahun 2012 tingkat kemiskinan mengalami penurunan kembali menjadi 14,98 persen.

Gambar 1.1 Tingkat Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2012



Sumber : Susenas (Diolah)

Kemiskinan merupakan sesuatu yang kompleks dalam arti kemiskinan bukan hanya disebabkan karena masalah kekurangan pendapatan dan harta (*lack*

of income and asset), tetapi berkaitan dengan dimensi lain di luar ekonomi. Kemiskinan adalah masalah rendahnya kualitas sumber daya manusia, masalah sandang, pangan dan papan, masalah lapangan pekerjaan, dan masalah ketidakpastian masa depan. Singkatnya, kemiskinan merupakan masalah serba kekurangan dan merupakan fenomena yang banyak terjadi di daerah-daerah perdesaan pada umumnya dan sektor pertanian khususnya. (Nanga, 2006)

Permasalahan kemiskinan dapat ditinjau dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut Ikhsan (1999) faktor-faktor yang menjadi penentu kemiskinan yaitu, *pertama*, modal sumber daya manusia (*human capital*) yang diindikasikan dengan tingkat pendidikan, karena modal SDM merupakan faktor yang akan mempengaruhi kemampuan untuk memperoleh pekerjaan atau pendapatan. Secara umum semakin tinggi tingkat pendidikan maka akan semakin tinggi kemungkinan seseorang bekerja di sektor formal dengan pendapatan yang lebih tinggi. *Kedua*, modal fisik produktif yang meliputi luas lantai perkapita dan kepemilikan asset seperti lahan, khususnya untuk sektor pertanian, kepemilikan lahan akan menjadi faktor yang penting mengingat dengan tersedianya lahan yang produktif, seseorang dengan lapangan usaha pertanian akan dapat menghasilkan pendapatan yang lebih baik. *Ketiga*, status pekerjaan, dimana status pekerjaan akan memberikan dampak bagi pola pendapatan seseorang.

Peran pemerintah dalam mempengaruhi kemiskinan termasuk dalam mengantisipasi kegagalan pasar dalam perekonomian sangat penting. Perannya melalui kebijakan fiskal ditargetkan dapat menyelesaikan masalah pembangunan (kemiskinan, pengangguran dan distribusi pendapatan). Menurut Mankiw (2003)

Kebijakan fiskal terdiri dari dua instrumen utama yaitu kebijakan pajak dan pengeluaran pemerintah. Peran pemerintah melalui kebijakan fiskal dengan tiga tujuan yang masing-masing memiliki tujuan yang berbeda-beda, yaitu:

1. Fungsi alokasi berhubungan dengan persediaan barang-barang sosial dan proses pemanfaatan sumber daya secara menyeluruh untuk produksi barang-barang swasta, barang sosial dan kombinasi dari barang sosial yang telah dipilih.
2. Fungsi distribusi berhubungan dengan persamaan kesejahteraan dan distribusi pendapatan dalam masyarakat.
3. Fungsi stabilisasi ditujukan untuk menstabilkan atau mempertahankan rendahnya tingkat pengangguran, harga atau tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang telah ditargetkan.

Seiring dengan semakin meningkatnya kegiatan pemerintah dalam rangka menjalankan ke-tiga peran tersebut, maka konsekuensinya pemerintah harus mengalokasikan anggaran yang besar sebagai bentuk pengeluaran semua kegiatan pemerintah untuk menunjang berlangsungnya ke-tiga peran tersebut. Pengeluaran pemerintah dapat digunakan sebagai cerminan kebijakan yang di ambil oleh pemerintah dalam suatu wilayah. Kebijakan pemerintah dalam tiap pembelian barang dan jasa guna pelaksanaan suatu program mencerminkan besarnya biaya yang akan dikeluarkan pemerintah untuk melaksanakan program tersebut.

Tabel 1.2 Realisasi Pengeluaran Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 - 2012 (dalam jutaan rupiah)

Kabupaten/Kota	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kab. Cilacap	894.515	1.017.201	1.192.689	1.237.942	1.354.502	1.587.167
Kab. Banyumas	866.677	1.029.091	1.112.316	1.269.219	1.531.621	1.636.935
Kab. Purbalingga	570.960	705.223	702.705	762.423	893.007	1.098.394
Kab. Banjarnegara	620.943	702.147	739.036	821.286	1.025.500	1.254.280
Kab. Kebumen	883.415	931.891	833.036	999.054	1.154.243	1.258.375
Kab. Purworejo	618.099	710.537	754.722	785.422	945.182	1.016.878
Kab. Wonosobo	522.731	616.298	652.221	692.607	893.769	1.004.910
Kab. Magelang	791.818	884.915	956.933	1.036.272	1.169.089	1.261.296
Kab. Boyolali	693.115	798.925	896.086	964.590	1.103.339	1.213.093
Kab. Klaten	873.587	992.524	1.022.358	1.148.962	1.299.874	1.384.610
Kab. Sukoharjo	616.794	720.415	753.005	817.475	919.539	1.105.748
Kab. Wonogiri	716.890	889.917	971.247	975.858	1.118.484	1.231.062
Kab. Karanganyar	632.500	796.488	799.688	813.046	901.207	1.129.470
Kab. Sragen	707.066	702.642	821.434	877.901	1.044.565	1.128.610
Kab. Grobogan	739.195	815.352	817.577	883.480	1.152.682	1.291.374
Kab. Blora	637.082	831.778	841.145	885.449	1.024.630	1.223.753
Kab. Rembang	565.692	576.094	593.546	659.791	800.888	996.747
Kab. Pati	806.954	970.450	985.496	1.016.595	1.169.089	1.386.559
Kab. Kudus	654.273	689.760	901.147	916.388	971.632	1.190.245
Kab. Jepara	611.500	764.397	804.539	867.087	1.033.453	1.247.389
Kab. Demak	636.275	716.193	782.360	835.772	1.040.197	1.208.869
Kab. Semarang	674.033	742.627	767.322	877.835	942.876	1.056.606
Kab. Temanggung	519.948	594.489	619.738	646.510	726.785	926.427
Kab. Kendal	631.571	771.433	799.716	828.122	1.016.191	1.134.277
Kab. Batang	453.029	603.585	623.547	601.703	768.577	915.743
Kab. Pekalongan	525.330	670.632	697.229	797.030	898.873	1.018.549
Kab. Pemasang	577.839	693.393	769.847	878.511	990.698	1.127.475
Kab. Tegal	717.616	889.415	908.245	961.866	1.129.573	1.176.336
Kab. Brebes	916.849	1.013.722	1.163.264	1.222.515	1.428.603	1.589.785
Kota Magelang	323.171	302.134	307.436	298.383	336.515	536.349
Kota Surakarta	639.638	785.305	830.538	868.253	1.069.115	1.198.484
Kota Salatiga	283.951	401.129	430.982	446.924	477.423	571.682
Kota Semarang	1.238.237	1.431.844	1.598.601	1.679.072	1.821.102	1.627.491
Kota Pekalongan	214.086	371.968	390.943	440.512	474.695	580.502
Kota Tegal	369.340	406.025	468.915	494.368	518.175	620.526
Jumlah	22.744.723	26.569.939	28.349.609	30.308.223	35.145.693	40.115.996

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (Diolah)

Berdasarkan Tabel 1.2 menunjukkan bahwa realisasi pengeluaran daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah secara nominal dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari jumlah realisasi pengeluaran daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dalam enam tahun terakhir. Pada tahun 2007 jumlah realisasi pengeluaran daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa

Tengah sebesar 22,7 trilyun rupiah. Kemudian tiap tahunnya terus mengalami peningkatan sampai terakhir pada tahun 2012 sebesar 40,12 trilyun rupiah. Namun dari jumlah realisasi pengeluaran daerah Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Tengah yang terus meningkat tersebut, apabila dilihat secara teliti ternyata terdapat beberapa kabupaten/kota di Jawa Tengah yang tidak mengalami peningkatan ditiap tahunnya. Kabupaten/Kota tersebut adalah Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Batang, Kota Magelang, dan Kota Semarang. Kabupaten/Kota tersebut tidak mengalami peningkatan pada tahun-tahun tertentu.

Kebijakan pengeluaran pemerintah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kebijakan pengeluaran pemerintah daerah dalam APBD tercermin dari total belanja pemerintah yang dialokasikan dalam anggaran daerah. Pengeluaran pemerintah daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi/kabupaten/kota dibedakan menjadi atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Tabel 1.3 Perkembangan Pengeluaran Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 - 2012 (dalam jutaan rupiah)

Jenis pengeluaran	2007	2008	2009	2010	2011	2012
I. Urusan Wajib	21.599.600	25.286.726	27.132.544	29.059.725	33.787.323	38.430.637
1. Pendidikan	8.961.163	10.824.243	12.591.227	14.232.666	17.688.225	20.085.140
2. Kesehatan	2.224.426	2.597.736	2.931.490	3.405.751	3.774.612	4.396.898
3. Infrastruktur	2.613.639	2.772.421	2.353.298	2.379.373	2.515.994	3.414.079
4. Perumahan	69.078	107.895	142.620	154.816	169.311	168.953
5. Penataan Ruang	66.913	69.600	67.354	74.107	56.302	133.892
6. Perencanaan Pembangunan	188.392	198.527	183.857	185.753	187.488	224.779
7. Perhubungan	200.407	236.312	242.955	284.726	304.211	306.345
8. Lingkungan Hidup	300.643	340.034	286.711	251.014	291.492	400.302
9. Pertanahan	48.629	36.603	41.667	32.479	59.953	47.634
10. Kependudukan dan Capil	166.230	147.732	138.159	171.403	141.476	197.157
11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.841	14.741	115.287	95.348	94.053	100.491
12. KB & Keluarga Sejahtera	86.808	104.852	104.652	86.366	111.240	120.862
13. Sosial	76.389	93.827	107.524	92.127	126.608	112.909
14. Ketenagakerjaan	125.089	131.450	146.734	129.944	139.656	178.345
15. Koperasi & UKM	89.360	115.580	172.578	196.704	183.493	202.669
16. Penanaman Modal	29.911	59.420	49.496	68.497	59.554	54.646
17. Kebudayaan	24.522	37.122	67.158	75.574	56.306	57.131
18. Pemuda & Olahraga	18.574	45.046	71.129	61.976	104.789	87.749
19. Kesbangpol	177.873	223.451	278.082	252.402	248.981	292.139
20. Pemerintahan Umum	5.498.512	6.139.562	6.498.584	6.701.519	7.075.054	7.386.892
21. Kepegawaian	406.193	598.595	83.894	6.956	-	-
22. Ketahanan Pangan	-	8.046	56.739	81.449	99.344	130.673
23. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	136.080	174.810	207.688	181.538	177.340	214.588
24. Statistik	2.004	3.711	3.974	5.025	3.116	13.955
25. Kearsipan	27.002	26.498	30.709	30.953	27.802	27.875
26. Komunikasi & Informatika	77.851	82.431	46.526	38.288	41.573	46.270
27. Perpustakaan	-	6.297	35.744	31.432	38.427	34.443
II. Urusan Pilihan	1.145.123	1.283.213	1.158.087	1.248.498	1.359.370	1.685.359
1. Pertanian	509.621	568.797	515.320	534.906	614.210	652.225
2. Kehutanan	63.668	68.375	60.149	67.610	81.435	101.893
3. Energi dan Sumber Daya Mineral	60.688	66.748	70.882	194.872	82.887	162.134
4. Pariwisata	108.564	139.169	90.316	79.828	81.842	110.865
5. Kelautan dan Perikanan	136.881	118.427	117.168	138.251	179.136	229.642
6. Perdagangan	209.275	264.147	203.590	162.511	207.090	295.397
7. Industri	51.072	50.138	96.079	112.206	98.177	128.415
8. Ketransmigrasian	5.354	7.412	4.583	3.589	3.466	4.788
Jumlah Pengeluaran	22.744.723	26.569.939	28.349.609	30.308.223	35.145.693	40.115.996

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Berdasarkan Tabel 1.3 menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah daerah secara nominal dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Pengeluaran pemerintah daerah dibagi menjadi atas urusan wajib yang diklasifikasikan menjadi dua puluh tujuh pos dan urusan pilihan yang diklasifikasikan menjadi delapan pos. Format baru ini merupakan reklasifikasi atas program yang dalam format lama pengeluaran rutin dan pembangunan per sektor. Pengeluaran pemerintah daerah yang dipergunakan baik dalam urusan wajib dan urusan pilihan menunjukkan alokasi pengeluaran di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan sektor pertanian menjadi prioritas utama untuk mencapai pembangunan. Hal ini dapat dilihat dari proporsi alokasi anggaran keempat sektor tersebut paling tinggi jika dibandingkan dengan sektor yang lainnya.

Peningkatan jumlah pengeluaran Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah untuk mengatasi masalah pembangunan (kemiskinan, pengangguran dan distribusi pendapatan). Membuat pengeluaran bermanfaat bagi masyarakat miskin merupakan syarat yang harus untuk menekan angka kemiskinan dan pengangguran saat ini, terutama mengingat peluang dari sisi fiskal. Menurut Saparini (2008) dikatakan bahwa pemerintah harus memprioritaskan alokasi anggaran untuk program-program pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Selain itu, pemerintah harus memperbesar alokasi belanja modal dan mengurangi biaya birokrasi. Ini dikarenakan kecenderungan anggaran yang meningkat namun tidak signifikan menurunkan angka kemiskinan. Hal ini juga dikemukakan oleh Von Braun (2002) bahwa kesejahteraan

masyarakat dilihat dari pemenuhan layanan publik dasar seperti : pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang dianggap akan memiliki hubungan langsung dengan tingkat kemiskinan di dalam masyarakat.

Kebijakan pembangunan sektor pertanian sangat penting untuk memberantas kemiskinan, karena realita menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk miskin tinggal di daerah perdesaan dan mempunyai mata pencaharian di sektor pertanian (Todaro dan Smith, 2003). Singkatnya, peningkatan pengeluaran pembangunan untuk sektor pertanian adalah merupakan hal yang sangat penting, sebab sektor pertanian merupakan sebagian besar angkatan kerja perdesaan di negara-negara sedang berkembang termasuk Indonesia. Hal ini juga di kemukakan oleh Yudhoyono (2004) bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah untuk sektor pertanian berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, dan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian dan non-pertanian, dan penurunan tingkat kemiskinan di perdesaan dan perkotaan.

Pemerintah sebagai pelaksana pembangunan membutuhkan manusia yang berkualitas sebagai modal dasar bagi pembangunan. Oleh karena itu, dibutuhkan investasi untuk dapat menciptakan pembentukan sumber daya manusia (SDM) yang produktif. Investasi pengembangan SDM diharapkan akan berpengaruh positif terhadap kinerja perekonomian yang salah satunya dapat diamati dari aspek tingkat pendidikan, kesehatan, tingkat kemiskinan dan investasi pengembangan SDM membutuhkan kebijakan pemerintah yang tepat sasaran dalam mendorong peningkatan kualitas SDM. Menurut Mankiw (2003) pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan perbaikan kualitas modal manusia. Pendidikan

dan kesehatan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar di suatu wilayah. Kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan, dan pendidikan adalah hal yang pokok untuk mencapai kehidupan yang layak. Pendidikan memiliki peran yang penting dalam membentuk kemampuan sebuah negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan (Todaro, 2000).

Pembangunan infrastruktur mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pembangunan perekonomian daerah. Menurut Tim LPEM-PSEKP-PSP (2004) menyebutkan bahwa salah satu untuk menanggulangi kemiskinan yang cukup efektif adalah pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur dasar yang penting pembangunan jalan, jembatan, irigasi, penyediaan air bersih, sanitasi dan penyediaan tenaga listrik yang terintegrasi dengan baik akan meningkatkan kondisi pembangunan daerah maupun nasional. Hal ini juga dikemukakan oleh Friawan (2008) bahwa infrastruktur sangat penting dalam sebuah integritas ekonomi yaitu, *pertama*, ketersediaan infrastruktur yang baru merupakan mesin utama pembangunan ekonomi. *Kedua*, untuk memperoleh manfaat yang penuh dari integrasi, ketersediaan jaringan infrastruktur sangat penting dalam memperlancar aktifitas perdagangan dan investasi. *Ketiga*, perhatian terhadap perbaikan infrastruktur juga penting untuk mengatasi kesenjangan pembangunan ekonomi antar negara.

Tabel 1.4 Jumlah Pengeluaran Pembangunan untuk Investasi Pertanian, Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2007 - 2012 (dalam jutaan rupiah)

Jenis Pengeluaran	Tahun					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Pertanian	509.621 (2,24)	568.797 (2,14)	515.320 (1,82)	534.906 (1,76)	614.210 (2,04)	652.225 (2,20)
Pendidikan	8.961.163 (39,4)	10.824.243 (40,74)	12.591.227 (44,41)	14.232.666 (46,96)	17.688.225 (50,33)	20.085.140 (50,07)
Kesehatan	2.224.426 (9,78)	2.597.736 (9,78)	2.931.490 (10,34)	3.405.751 (11,24)	3.751.593 (10,67)	4.396.898 (10,96)
Infrastruktur	2.613.639 (11,49)	2.772.421 (10,43)	2.353.298 (8,30)	2.379.373 (7,85)	2.515.994 (7,16)	3.414.079 (8,51)
Jumlah Pengeluaran	22.744.723	26.569.939	28.349.609	30.308.223	35.145.693	40.115.996

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Keterangan : angka cetak miring adalah % terhadap total pengeluaran

Pada Tabel 1.4 menunjukkan perkembangan pengeluaran pemerintah di sektor pertanian, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur di provinsi Jawa Tengah periode tahun 2007 hingga tahun 2012 yang selalu mengalami peningkatan. Dengan memperhatikan tabel tersebut dapat diketahui bahwa proporsi pengeluaran pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah di sektor pendidikan merupakan proporsi terbesar jika dibandingkan dengan proporsi pengeluaran dari pada sektor lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa pada era desentralisasi fiskal dan otonomi daerah, pemerintah Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Tengah betul-betul ingin mewujudkan pembangunan daerahnya yang diprioritaskan pada pembangunan pendidikan. Jumlah pengeluaran yang bertujuan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pendidikan sesuai dengan janji pemerintah pusat yang mengatakan bahwa alokasi pengeluaran untuk sektor pendidikan minimal dari 20 persen dari total belanja pemerintah daerah. Proporsi

pengeluaran di sektor pertanian merupakan proporsi pengeluaran terkecil yaitu hanya 1,76 % - 2,24 % dari total pengeluaran pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, sektor pertanian merupakan sektor yang identik dengan kehidupan masyarakat miskin, karena penduduk miskin bekerja di sektor pertanian, yang sebagian besar buruh harian lepas bukan pemilik lahan. Pembangunan pertanian ini diharapkan memberdayakan penduduk untuk meningkatkan taraf kehidupan sehingga akan menurunkan tingkat kemiskinan.

Pengeluaran pemerintah sektor pertanian, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur pada dasarnya merupakan suatu investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Efek pembangunan pada keempat sektor tersebut tidak dapat berdampak secara langsung melainkan membutuhkan beberapa periode untuk merasakan dampaknya. Sehingga pemerintah harus membuat prioritas pembangunan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek misalnya mengalokasikan pengeluaran sektor pertanian karena sektor pertanian terbukti efektif meningkatkan kinerja ekonomi, pemerataan pendapatan dan pengurangan tingkat kemiskinan. Dalam jangka panjang misalnya mengalokasikan sektor pendidikan dan sektor kesehatan.

Penelitian-penelitian terdahulu yang mengkaji tentang hubungan pengeluaran pemerintah terhadap pengentasan tingkat kemiskinan. Studi yang dilakukan Triyowati (2005) meneliti tentang dampak desentralisasi fiskal terhadap tenaga kerja dan tingkat kemiskinan. Penelitian tersebut melihat dari pengeluaran pemerintah di sektor infrastruktur, pertanian, pendidikan, dan kesehatan. Hasil

yang didapat bahwa pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan tidak berdampak terhadap jumlah tenaga kerja dan tingkat kemiskinan. Pengeluaran di sektor infrastruktur berdampak positif terhadap jumlah tenaga kerja dan tidak mempunyai dampak terhadap tingkat kemiskinan. Sedangkan pengeluaran di sektor pertanian tidak mempunyai dampak terhadap jumlah tenaga kerja dan berdampak positif terhadap tingkat kemiskinan. Hasil penelitian terdahulu masih sangat beragam mengenai hubungan pengeluaran pemerintah dalam sektor publik, terutama sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pertanian secara bersama-sama mempengaruhi penyerapan tenaga kerja dan tingkat kemiskinan.

Yudhoyono (2004), dalam penelitiannya juga membahas tentang dampak penerapan kebijakan fiskal, terutama pengeluaran pemerintah terhadap pengangguran dan kemiskinan. Hasil simulasi menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah untuk pembangunan infrastruktur berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi pengangguran. Selain itu, studi Yudhoyono menemukan bahwa untuk mengurangi kemiskinan, khususnya di perdesaan, diperlukan *policy mix* antara pengeluaran pemerintah untuk pembangunan pertanian dan kebijakan upah.

Dengan melihat gambaran kondisi selama pelaksanaan desentralisasi fiskal belum mampu mengatasi permasalahan yang serius yang dihadapi provinsi Jawa Tengah yaitu belum mampu mengatasi laju penurunan tingkat kemiskinan yang cukup signifikan. Pemerintah daerah dapat meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, karena pemerintah lebih dekat dan mudah

memonitor dan mengevaluasi proyek apa saja yang kiranya sesuai dengan potensi masyarakat yang ada untuk menanggulangi kemiskinan. Peran pemerintah dalam mempengaruhi kemiskinan melalui kebijakan pengeluaran ditargetkan dapat menyelesaikan masalah pembangunan (kemiskinan, pengangguran), yaitu dengan mengalokasikan anggaran yang mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan permasalahan tersebut.

Dari latar belakang diatas, maka penelitian ini membahas tentang pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pertanian, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur terhadap tingkat kemiskinan pada era desentralisasi fiskal. Dimana studi kasusnya mengambil Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul “*Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pertanian, Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur Terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah)*”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah paling tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi lain di Pulau Jawa. Walaupun tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2007 sampai tahun 2012 mengalami periode yang relatif baik karena mengalami tren yang cenderung menurun. Untuk itu diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai solusi untuk mengurainya. Menurut World Bank (2006) untuk menanggulangi kemiskinan, pemerintah dapat membantu mereka dalam menghadapi kemiskinan (baik dari

segi pendapatan maupun non-pendapatan) yaitu : *pertama*, pengeluaran pemerintah yang membantu masyarakat miskin dari segi pendapatan melalui perlindungan sosial modern yang meningkatkan kemampuan mereka sendiri untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi. *Kedua*, pengeluaran pemerintah dapat digunakan untuk memperbaiki indikator-indikator pembangunan manusia, sehingga dapat mengatasi kemiskinan dari aspek non-pendapatan.

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu instrumen untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnya, yaitu dengan memprioritaskan pengeluaran pemerintah daerah yang sangat erat kaitannya dengan kemiskinan atau menjadi faktor penentu untuk mengatasi penanggulangan kemiskinan. Pengeluaran tersebut adalah pengeluaran pemerintah di sektor pertanian, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Keempat sektor tersebut merupakan sektor yang sangat penting bagi proses pembangunan. Pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pertanian, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur terhadap tingkat kemiskinan tidak dapat dirasakan langsung dalam jangka pendek melainkan baru akan dirasakan dalam jangka panjang.

Didasari latar belakang tersebut muncul pertanyaan penelitian yang dapat dikemukakan adalah :

1. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pertanian terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Jawa Tengah?
2. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan tingkat kemiskinan di provinsi Jawa Tengah?

3. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Jawa Tengah?
4. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor infrastruktur terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Jawa Tengah?
5. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pertanian, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur secara bersama-sama terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Jawa Tengah?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pertanian terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Jawa Tengah selama periode 2007-2012.
2. Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Jawa Tengah periode 2007-2012.
3. Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Jawa Tengah periode 2007-2012.
4. Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor infrastruktur terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Jawa Tengah periode 2007-2012.

5. Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pertanian, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur secara bersama-sama terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Jawa Tengah periode 2007-2012.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Sebagai bahan masukan dan rekomendasi bagi pembuat kebijakan yakni pemerintah pusat maupun pemerintah daerah khususnya Pemerintah Daerah di provinsi Jawa Tengah sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan dalam mendorong perekonomian, pembangunan daerah.
2. Sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya dalam melakukan penelitian yang sejenis dan sumbangan pemikiran tentang, pembangunan ekonomi dan otonomi daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang dari penelitian yang mengenai tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah, dimana dipengaruhi oleh pengeluaran daerah sektor pertanian, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Selanjutnya dirumuskan permasalahan penelitian yang berupa pertanyaan kajian. Berdasarkan perumusan masalah tersebut maka dikemukakan tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang teori dan penelitian terdahulu yang melandasi penelitian ini. Dasar teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah otonomi daerah, desentralisasi fiskal, konsep kemiskinan, dan teori pengeluaran pemerintah. Berdasarkan teori dan hasil penelitian-penelitian terdahulu maka akan terbentuk suatu kerangka pemikiran dan hipotesis awal yang akan diuji.

kerangka pemikiran teoritis dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian dan definisi operasional variabel penelitian, jenis serta sumber data, metode pengumpulan serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian. Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat kemiskinan, pengeluaran daerah sektor pertanian, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Data diperoleh dari BPS dan direktorat jenderal perimbangan keuangan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai uraian tentang gambaran umum mengenai objek penelitian. Bagian pembahasan menerangkan interpretasi dan pembahasan hasil penelitian secara komprehensif.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi mengenai kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan bab IV, selain itu bab ini juga berisi saran-saran yang nantinya berguna bagi pihak yang berkepentingan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, menganalisis tentang Pengaruh Pengeluaran Pemerintah atas Sektor Pertanian, Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah). Penelitian ini mendasarkan teori-teori yang relevan dengan penelitian sehingga mendukung bagi terciptanya hasil penelitian yang ilmiah. Dasar teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini adalah teori otonomi daerah, desentralisasi fiskal, teori kemiskinan, dan teori pengeluaran pemerintah. Selain dengan dasar teori, penelitian ini juga menggunakan penelitian terdahulu sebagai referensi.

Disamping itu, agar secara empiris penelitian ini dapat dibandingkan dengan hasil-hasil penelitian sejenisnya atau yang memiliki tema yang hampir sama, maka dari itu dilengkapi juga dengan beberapa penelitian terdahulu tentang pengeluaran pemerintah dan kemiskinan. Penelitian tersebut kemudian digunakan untuk menjadi acuan serta pembanding dalam penelitian ini.

2.1.1 Otonomi Daerah

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan daerah otonom itu sendiri adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya dalam memenuhi kebutuhan daerah sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh daerah. Lebih dari satu dekade otonomi daerah sudah berjalan di Indonesia, diharapkan otonomi bukan hanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Menurut Kaloh (2007) otonomi daerah harus didefinisikan sebagai sebagai otonomi bagi rakyat daerah dan bukan hanya otonomi yang didaerahkan, otonomi daerah bukan sekedar pelimpahan wewenang tetapi juga peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

2.1.2 Pengertian dan Konsep Desentralisasi Fiskal

Menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maksudnya adalah dengan adanya desentralisasi, pemerintah pusat memberi wewenang dan tanggung jawab kepada daerah otonom untuk mengatur pemerintahannya secara mandiri.

Desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan. Menurut

Khusaini (2006) desentralisasi fiskal merupakan pelimpahan kewenangan di bidang penerimaan anggaran atau keuangan yang sebelumnya tersentralisasi, baik secara administrasi maupun pemanfaatannya diatur atau dilakukan oleh pemerintah pusat.

Desentralisasi dapat pula diartikan sebagai pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah di bidang penerimaan anggaran atau keuangan, baik secara administrasi maupun pemanfaatannya diatur atau dilakukan oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, salah satu makna desentralisasi fiskal dalam bentuk pemberian otonomi di bidang keuangan (sebagian sumber penerimaan) kepada daerah-daerah merupakan suatu proses pengintensifikasian peranan dan sekaligus pemberdayaan daerah dalam pembangunan.

United Nation Development Programme (UNDP) dalam (Triyowati, 2005) menjabarkan tentang desentralisasi pemerintah sebagai berikut:

Decentralized governance, carefully planned, effectively implemented and appropriately managed, can lead to significant improvement in the welfare of people at the local level, the cumulative effect of which can lead to enhanced human development.

Dengan menyimak pernyataan tersebut, maka pada hakekatnya pelaksanaan suatu desentralisasi pemerintah harus direncanakan secara hati-hati, diimplementasikan secara efektif dan dikelola dengan baik, dapat meningkatkan perbaikan kesejahteraan masyarakatnya secara nyata, dimana efek kumulatifnya dapat meningkatkan pembangunan manusia.

Disisi lain azas-azas penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Undang Undang No.33 tahun 2004 dibagi menjadi tiga, yaitu :

1. Desentralisasi, adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Kabupaten/Kota sehingga otonomi lebih dititikberatkan pada daerah tersebut.
2. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
3. Tugas pembantuan, adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dan pemerintah provinsi kepada Kabupaten/Kota kepada Kabupaten/Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antar tingkat pemerintahan. Sumber-sumber penerimaan daerah antara lain, pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah, dan dana penerimaan yang sah lainnya.

Berkaitan dengan kedua undang-undang tersebut, LPEM FEUI, 2000, menyimpulkan beberapa manfaat yang muncul dari adanya penerapan desentralisasi fiskal, antara lain: menyebarkan pusat pengambilan keputusan, kecepatan dalam pengambilan keputusan, pengambilan keputusan yang realistis, penghematan, keikutsertaan masyarakat lokal dan menciptakan solidaritas nasional.

Dari definisi tersebut dapat dilihat perbedaan antara otonomi daerah dengan desentralisasi fiskal. Perbedaannya yaitu, jika dari segi otonomi daerah

merupakan suatu kebebasan dalam menjalankan perekonomian daerah yang dijalankan oleh daerah itu sendiri, sedangkan desentralisasi fiskal merupakan pendistribusian wewenang atau kekuasaan dari tingkat provinsi pusat ke pemerintah daerah. Namun pada hakekatnya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal mempunyai satu tujuan, yaitu untuk menjadikan pemerintah lebih dekat dengan rakyatnya, sehingga pelayanan pemerintah dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Hal ini berdasarkan asumsi bahwa pemerintah Kabupaten dan Kota memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kebutuhan dan aspirasi masyarakat mereka daripada pemerintah pusat.

2.1.3 Konsep dan Definisi Kemiskinan

Kemiskinan (*poverty*) merupakan masalah yang kritis yang harus ditangani dalam pembangunan nasional. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah sejauhmana kemiskinan dapat dikendalikan dan diupayakan untuk dikurangi secara nyata dari waktu ke waktu. Tujuan akhirnya jelas, yaitu untuk terciptanya keadilan dan kemakmuran bersama. Dalam keseharian, kemiskinan dipersepsikan dalam konteks ketidakcukupan pendapatan dan kepemilikan uang serta aset dalam dimensi ekonomi (Yudhoyono dan Harniati, 2004)

Konsep tentang kemiskinan dari Bappenas (2004) adalah kemiskinan dilihat dari kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar menurut Bappenas

terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Dalam melihat hak-hak ini Bappenas menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan kebutuhan dasar, pendekatan pendapatan, pendekatan kemampuan dasar dan pendekatan objektif and subjektif.

Dengan memperhatikan konsep kemiskinan yang berlaku indikator kemiskinan dapat dibedakan menurut kelompok indikator kebutuhan dasar yaitu, melihat kemiskinan sebagai suatu ketidakmampuan seseorang, keluarga dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan minimumnya antara lain, pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, penyediaan air bersih dan sanitasi. Menurut indikator pendapatan, kemiskinan disebabkan oleh rendahnya penguasaan asset dan alat-alat produktif seperti tanah dan lahan pertanian atau perkebunan, sehingga secara langsung mempengaruhi pendapatan seseorang dalam masyarakat. Pendekatan ini menentukan secara *rigid* standar pendapatan seseorang di dalam masyarakat untuk membedakan kelas sosialnya. Indikator kemampuan dasar merupakan gabungan dari indikator pendapatan dan indikator kebutuhan dasar ditambah dengan indikator penguasaan asset berupa modal, lahan, prasarana, dan lingkungan, serta tingkat partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan indikator lain yang relevan (Mubyarto, 2002).

Menurut Nurkse, 1953 dalam Mudrajad Kuncoro (1997), ukuran kemiskinan secara sederhana dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1. Kemiskinan Absolut

Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan dan tidak cukup untuk menentukan kebutuhan dasar hidupnya. Konsep ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup.

Kesulitan utama dalam konsep kemiskinan absolut adalah menentukan komposisi dan tingkat kebutuhan minimum karena kedua hal tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh adat kebiasaan saja, tetapi juga iklim, tingkat kemajuan suatu negara, dan faktor-faktor ekonomi lainnya. Walaupun demikian, untuk dapat hidup layak, seseorang membutuhkan barang-barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan fisik dan sosialnya.

2. Kemiskinan Relatif

Seseorang termasuk golongan miskin relatif apabila telah dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat sekitarnya. Berdasarkan konsep ini, garis kemiskinan akan mengalami perubahan bila tingkat hidup masyarakat berubah sehingga konsep kemiskinan ini bersifat dinamis atau akan selalu ada.

Oleh karena itu, kemiskinan dapat dari aspek ketimpangan sosial yang berarti semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan atas

dan golongan bawah, maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat dikategorikan selalu miskin.

3. Kemiskinan Kultural

Seseorang termasuk golongan miskin kultural apabila sikap orang atau sekelompok masyarakat tersebut tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya atau dengan kata lain seseorang tersebut miskin karena sikapnya sendiri yaitu pemalas dan tidak mau memperbaiki kondisinya.

2.1.3.1 Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan merupakan sebuah konsep abstrak yang dapat dijelaskan secara berbeda, yaitu tergantung dari sudut pandang analisis dalam memahami kondisi, sifat, dan konteks kemiskinan, bagaimana masalah kemiskinan dapat diatasi. Oleh karena itu, agar penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan secara tepat, maka hal pertama yang harus diperhatikan adalah menjelaskan pengertian dan penyebab kemiskinan secara lengkap.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan seorang dikategorikan miskin. Namun, menurut *World Bank* menyebutkan ada tiga faktor utama penyebab kemiskinan, yaitu:

1. Rendahnya pendapatan dan aset untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti: makanan, tempat tinggal, pakaian, kesehatan dan pendidikan.

2. Ketidakmampuan untuk bersuara dan ketiadaan kekuatan di depan institusi negara dan masyarakat.
3. Rentan terhadap guncangan ekonomi, terkait dengan ketidakmampuan menanggulangnya.

World Bank juga mendeskripsikan indikator-indikator kemiskinan yang terdiri dari:

1. Kepemilikan tanah dan modal yang terbatas
2. Terbatasnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan
3. Pembangunan yang bias di kota
4. Perbedaan kesempatan diantara anggota masyarakat
5. Perbedaan sumber daya manusia dan sektor ekonomi
6. Rendahnya produktivitas
7. Budaya hidup yang jelek
8. Tata pemerintahan yang buruk
9. Pengelola sumber daya alam yang berlebihan

Menurut Jhinghan (2000) terdapat tiga ciri utama pada negara berkembang yang menjadi penyebab dan sekaligus akibat dari terjadinya kemiskinan, yaitu, *pertama* sarana dan prasarana pendidikan yang tidak memadai sehingga menyebabkan tingginya jumlah penduduk buta huruf dan tidak memiliki ketrampilan atau keahlian. *Kedua*, sarana kesehatan dan pola konsumsi buruk sehingga hanya sebagian kecil penduduk yang bisa menjadi tenaga kerja produktif. Akibatnya, laju pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat. *Ketiga*

adalah penduduk terkonsentrasi di sektor pertanian dan pertambangan dengan metode produksi yang telah usang dan ketinggalan zaman. Hal ini terjadi karena penduduk tidak memiliki pilihan lain. Kepemilikan tanah rata-rata per petani cukup sempit dan sebagai akibatnya mereka terpaksa hidup pada tingkat yang hanya cukup untuk sekedar hidup.

Kartasasmita (1996) juga menjelaskan penyebab terjadinya kemiskinan dimana akibat dari berbagai faktor yang terdiri dari: *pertama*, rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan pengembangan diri yang terbatas. *Kedua*, rendahnya tingkat kesehatan dimana tingkat kesehatan dan gizi yang rendah menyebabkan daya tahan fisik, daya pikir serta prakarsa menjadi rendah pula. Dengan demikian produktivitas yang dihasilkan menjadi berkurang, baik dalam jumlah maupun kualitasnya. Akibat dari hal ini adalah *bargaining position* mereka dalam hampir seluruh kegiatan ekonomi menjadi lemah. *Ketiga*, terbatasnya lapangan kerja. Selama lapangan pekerjaan atau kegiatan usaha masih ada, harapan untuk memutuskan lingkaran kemiskinan masih dapat dilakukan. *Keempat*, kondisi keterisolasian. Dalam kondisi terpencil atau terisolasi penduduk akan kurang mampu menjalankan roda perekonomiannya.

Sedangkan menurut *Sharp* (1996) dari sudut pandang ekonomi terdapat tiga penyebab kemiskinan, antara lain:

1. Kemiskinan yang muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang.

Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah.

2. Kemiskinan yang muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya mendapatkan upah yang rendah. Rendahnya kualitas sumber daya ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau keturunan.
3. Kemiskinan yang muncul akibat perbedaan akses dalam modal.

2.1.4 Peran dan Campur Tangan Pemerintah dalam Perekonomian

Dalam sebuah perekonomian memerlukan sentuhan tangan pemerintah untuk mengatur kegiatan ekonomi. Secara umum peran Pemerintah dalam perekonomian dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok (Mangkoesoebroto, 1994), yaitu:

- a. Fungsi alokasi, yaitu mengalokasikan sumber daya yang digunakan dalam memproduksi barang yang berasal dari barang swasta atau barang publik.
- b. Fungsi distribusi, yaitu peran pemerintah dalam melakukan distribusi sumber daya bagi masyarakat.
- c. Fungsi stabilisasi, yaitu peran pemerintah dalam menjaga kestabilan penyerapan tenaga kerja, stabilitas harga, serta tingkat pertumbuhan ekonomi yang tepat yang berdampak pada neraca perdagangan dan neraca pembayaran.

2.1.4.1 Teori Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Mangkoesebroto, 1994). Dasar teori pengeluaran pemerintah adalah dari identitas keseimbangan pendapatan nasional, yaitu : $Y = C + I + G + (X-M)$ yang merupakan sumber legitimasi pandangan kaum Keynesian akan relevansi campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Peningkatan atau penurunan pengeluaran pemerintah akan mempengaruhi pendapatan nasional. Dalam mengalokasikan pengeluaran, pemerintah harus melakukan banyak pertimbangan, karena pemerintah tidak cukup hanya hanya meraih tujuan akhir dari setiap kebijaksanaan pengeluarannya. Tetapi harus mempertimbangkan sasaran antara yang akan menikmati kebijaksanaan tersebut. Meningkatkan pengeluaran pemerintah bukan semata-mata untuk meningkatkan pendapatan nasional atau memperluas kesempatan kerja adalah tidak memadai, melainkan harus memperhitungkan siapa saja yang akan meningkat pendapatannya. Pemerintah juga perlu menghindari agar peningkatan peran dalam perekonomian tidak melemahkan pihak swasta. (Dumairy, 1997)

Pemerintah mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup masyarakat, sehingga pemerintah harus mempertimbangkan dalam pengambilan kebijakan agar berdampak nyata terhadap masyarakat. Banyaknya pos-pos anggaran, sehingga pemerintah harus memprioritaskan alokasi anggaran untuk sektor-sektor yang menyangkut kebutuhan masyarakat luas, kebijakan pemerintah

menyangkut sektor pertanian, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kesejahteraan sosial adalah beberapa contoh diantaranya yang perlu diperhatikan lebih, hal ini dikarenakan sektor-sektor tersebutlah, masyarakat dapat merasakan secara langsung dampak dari kebijakan pemerintah yang diambil.

Menurut Mangkoesoebroto (1994) perkembangan teori makro mengenai pengeluaran pemerintah dapat dikelompokkan menjadi :

a. Model Pembangunan tentang Perkembangan Pengeluaran Pemerintah

Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap pembangunan ekonomi. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah lebih besar dari total investasi sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan sarana prasarana publik, misalnya pendidikan, kesehatan, transportasi, dan sebagainya. Pada tahap menengah investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun pada tahap ini peranan investasi swasta juga semakin besar. Peranan pemerintah tetap besar pada tahap menengah, oleh karena pada tahap ini banyak terjadi kegagalan pasar yang ditimbulkan karena perkembangan ekonomi. (Mangkoesoebroto, 1994)

Teori Rostow dan Musgrave merupakan suatu pandangan yang muncul dari pengamatan berdasarkan pembangunan ekonomi yang dialami oleh banyak negara, tetapi tidak didasarkan oleh suatu teori tertentu. Selain itu tidak jelas, apakah tahap pertumbuhan ekonomi terjadi dalam tahap demi

tahap, ataukah beberapa tahap dapat terjadi secara simultan.
(Mangkoesoebroto, 1994)

b. Hukum Wagner

Adolf Wagner mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah dalam perekonomian yang cenderung meningkat yang juga didasarkan pula pada pengamatan di negara-negara Eropa, Amerika, dan Jepang pada abad ke-19. Wagner mengukur perbandingan pengeluaran pemerintah terhadap produk nasional dengan mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran yang semakin besar dalam persentase terhadap PDB. (Dumairy, 1997). Wagner mengemukakan pendapatnya dalam suatu bentuk hukum, yaitu sebagai berikut: apabila pendapatan perkapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya. (Mangkoesoebroto, 1997)

Hukum tersebut dapat diformulasikan dengan notasi:

$$\frac{PkPP_1}{PPK_1} < \frac{PkPP_2}{PPK_2} < \dots < \frac{PkPP_n}{PPK_n}$$

Keterangan:

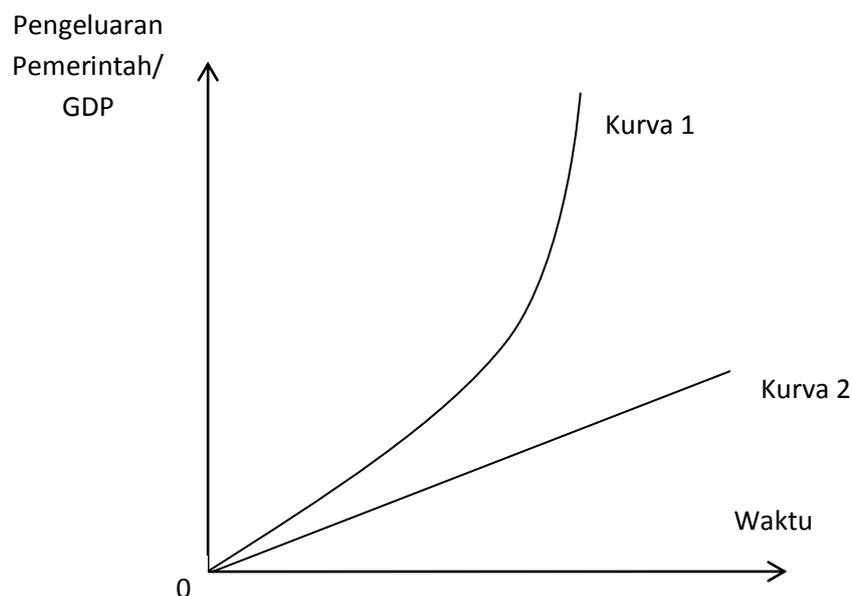
PkPP = Pengeluaran pemerintah perkapita

PPK = Pendapatan perkapita, yaitu GDP/jumlah penduduk

1,2, ..., n = Jangka waktu (tahun)

Hukum Wagner mendasarkan pandangannya pada suatu teori yang disebut *organic theory of state* yaitu teori organis yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak terlepas dengan masyarakat lain. Sebagaimana ditunjukkan dalam gambar sebagai berikut : secara relatif peranan pemerintah semakin meningkat. (Mangkoesebroto, 1997)

Gambar 2.1 Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah menurut Wagner



Sumber: Mangkoesebroto, 1997

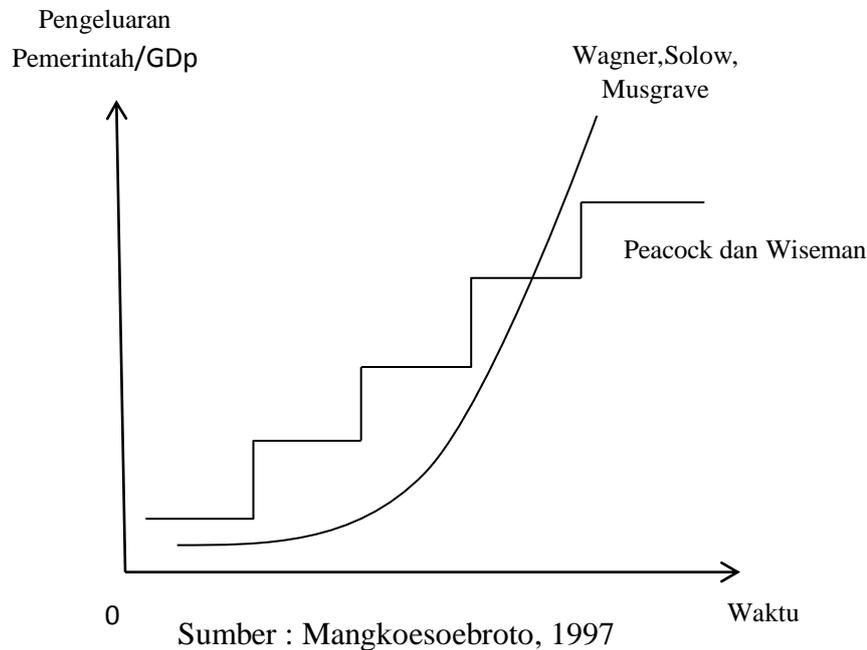
Menurut Wagner ada lima hal yang menyebabkan pengeluaran pemerintah selalu meningkat yaitu tuntutan peningkatan perlindungan keamanan dan pertahanan, kenaikan tingkat pendapatan masyarakat, urbanisasi yang

mengiringi pertumbuhan ekonomi, perkembangan ekonomi, perkembangan demokrasi dan ketidakefisienan birokrasi yang mengiringi perkembangan pemerintahan. (Dumairy, 1997).

c. Teori Peacock dan Wiseman

Peacock dan Wiseman mengemukakan sebuah teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah. Teori ini dikenal dengan "*The Displacement Effect*" dimana teori ini didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Peacock dan Wiseman mendasarkan teori ini pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai tingkat toleransi pajak, dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah (Mangkoesebroto, 1997). Tingkat toleransi ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pungutan pajak.

Gambar 2.2 Teori perkembangan pengeluaran pemerintah



Pertumbuhan ekonomi (PDB) menyebabkan meningkatnya pemungutan pajak walaupun tarif pajak tidak berubah dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan meningkatnya pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, meningkatnya PDB menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar. Berbeda dengan pandangan Wagner, perkembangan pengeluaran pemerintah versi Peacock dan Wiseman tidaklah berbentuk suatu garis, melainkan seperti tangga.

2.1.5 Gambaran Umum APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlaku untuk daerah tingkat I dan II. Pembentukan dan pengelolannya disesuaikan dengan tata cara yang berlaku pada pemerintahan pusat. Pendapatan Daerah tingkat I antara lain terdiri

dari pajak daerah tingkat I (pajak izin penangkapan ikan, pajak sekolah), pajak pusat diserahkan kepada daerah tingkat I, antara lain : Pajak Rumah Tangga, Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, opsen (opsen atas Pajak Kekayaan, opsen atas cukai bensin), retribusi (antara lain Retribusi izin pengambilan pasir, batu, kerikil, kapur, gamping, batu karang), subsidi daerah otonomi. Daerah tingkat II mendapatkan penghasilan dari berbagai pajak daerah (antara lain Pajak Tontonan, pajak reklame, pajak anjing dan lain-lain), pajak pusat (antara lain pajak radio, pajak bangsa asing, pajak pembangunan I dan sebagainya), sumbangan daerah otonom, Ipeda. Belanjanya adalah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan yang menjadi tugas di daerahnya.

Dalam UU No 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 17, menyebutkan bahwa APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD merupakan rencana keuangan tahunan daerah, dimana disatu sisi menggambarkan anggaran pengeluaran guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran dan disisi lain menggambarkan penerimaan daerah guna membiayai pengeluaran yang telah dianggarkan.

APBD merupakan dokumen anggaran tahunan, maka seluruh rencana penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan pada satu tahun anggaran dicatat dalam APBD. Dengan demikian APBD dapat menjadi cerminan kinerja dan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai dan mengelola penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di daerah masing-masing pada satu tahun anggaran. Anggaran daerah pada hakekatnya

merupakan salah satu alat yang memegang peranan penting dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Dengan demikian maka APBD harus benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

2.1.5.1 Klasifikasi Pengeluaran Pemerintah

Menurut Suparmoko (1994), pengeluaran pemerintah dapat dinilai dari berbagai segi, sehingga dapat dibedakan menjadi sebagai berikut:

1. Pengeluaran pemerintah merupakan bentuk investasi langsung untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.
2. Pengeluaran pemerintah langsung memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.
3. Pengeluaran pemerintah merupakan pengeluaran yang akan datang.
4. Pengeluaran pemerintah merupakan sarana penyedia kesempatan kerja yang lebih banyak dan penyebaran daya beli yang luas.

Oleh karena itu, pengeluaran pemerintah dapat diklasifikasikan menjadi:

1. Pengeluaran yang *self liquidating* sebagian atau sepenuhnya, artinya pengeluaran pemerintah mendapatkan pembayaran kembali dari masyarakat yang menerima jasa-jasa/barang-barang yang bersangkutan.

Misalnya, pengeluaran untuk jasa-jasa perusahaan pemerintah atau untuk proyek-proyek produktif barang ekspor.

2. Pengeluaran yang reproduktif, artinya mewujudkan keuntungan-keuntungan ekonomis bagi masyarakat, dimana dengan naiknya tingkat penghasilan dan sasaran pajak yang lain pada akhirnya akan menaikkan penerimaan pemerintah. Misalnya, pengeluaran untuk bidang pertanian, pendidikan, dan pengeluaran untuk menciptakan lapangan kerja, serta memicu peningkatan kegiatan perekonomian masyarakat.
3. Pengeluaran yang tidak *self liquidating* maupun yang tidak produktif, yaitu pengeluaran yang langsung menambah kegembiraan dan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, untuk bidang rekreasi, objek-objek pariwisata dan sebagainya.
4. Pengeluaran yang merupakan penghematan dimasa akan datang, misalnya pengeluaran untuk anak-anak yatim piatu, pengeluaran untuk kesehatan dan pendidikan masyarakat

2.1.6 Pengeluaran Pemerintah Sektor Pertanian

Pembangunan di bidang pertanian sangat penting bagi perekonomian dan kehidupan sosial bagian terbesar dalam masyarakat, karena potensi bagian besar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada dasarnya berbasis sumber daya pertanian yang dijadikan sebagai mata pencahariannya. Menurut Arifin (2004) Pembangunan pertanian bukan semata proses peletakan pondasi dan pembenahan struktur sektor pertanian dalam peta perekonomian, namun upaya

serius dan sistematis untuk menterjemahkan paradigma keberpihakan ke dalam langkah nyata yang dapat dimengerti dan dilaksanakan masyarakat banyak. Oleh karena itu diperlukan beberapa langkah mendasar dalam pembangunan pertanian untuk menanggulangi kemiskinan nasional. Menurut Munajat (2009) untuk menanggulangi kemiskinan di sektor pertanian dilakukan dengan: melalui *kooporate farming*, peningkatan produktivitas pertanian dan petani, pengembangan industri pengolahan di pedesaan, intervensi pemerintah pada sub sistem hulu dan sub sistem hilir, dan peningkatan SDM pertanian.

Realita menunjukkan bahwa sektor pertanian berkaitan erat dengan masyarakat miskin. Sektor pertanian merupakan sektor ekonomi yang sangat penting dan strategis karena masyarakat penduduk miskin bekerja di sektor pertanian dan dapat menyediakan lapangan kerja bagi angkatan kerja di daerah tersebut. Pembangunan pertanian ini diharapkan memberdayakan penduduk miskin, meningkatkan taraf kehidupan sehingga pada akhirnya akan menurunkan tingkat kemiskinan.

2.1.7 Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu bentuk investasi sumber daya manusia. Seseorang yang memperoleh pendidikan akan memperoleh kesempatan yang lebih baik dan bisa memperbaiki standar hidupnya. Pengaruh pendidikan tidak hanya mempengaruhi kemampuan individu untuk mendapatkan tingkat pendapatan yang tinggi, tetapi juga terhadap perilaku dan pengambilan keputusan, yang akan

meningkatkan kemungkinan sukses dalam menjangkau kebutuhan pokok, bahkan pendidikan akan membuat seorang terhindar dari kondisi miskin. (Zuluaga, 1990)

Tingkat pendidikan akan mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan mendorong peningkatan produktivitas tenaga kerja. Pada akhirnya seseorang yang memiliki produktivitas yang tinggi akan memperoleh kesejahteraan yang lebih baik, yang diperlihatkan melalui peningkatan pendapatan maupun konsumsinya. Rendahnya produktivitas kaum miskin dapat disebabkan oleh rendahnya akses mereka untuk memperoleh pendidikan (Rasidin K dan Bonar M, 2004). Dengan demikian diharapkan kondisi ini akan memajukan perekonomian masyarakat dengan berkurangnya kemiskinan.

Pengeluaran di sektor pendidikan sangat dibutuhkan masyarakat, oleh karena itu pemerintah harus membangun suatu sarana dan sistem pendidikan yang baik. Alokasi anggaran pemerintah di sektor pendidikan merupakan wujud nyata dari investasi untuk meningkatkan produktivitas masyarakat.

Menurut *Center for the Study of Living Standards* (2001) dalam Toyamah, dkk (2004) menyatakan bahwa pendidikan adalah elemen penting untuk memerangi kemiskinan, memberdayakan perempuan, serta menyelamatkan anak-anak dari upaya eksploitasi. Demikian juga pernyataan dari UNICEF yang mengatakan bahwa pendidikan adalah investasi yang penting untuk memperoleh pekerjaan yang layak dengan upah yang tinggi.

2.1.8 Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat, oleh karena itu kesehatan adalah hak bagi setiap warga masyarakat yang dilindungi Undang-Undang Dasar. Perbaikan pelayanan kesehatan pada dasarnya merupakan suatu investasi sumber daya manusia untuk mencapai masyarakat yang sejahtera (*welfare society*). Tingkat kesehatan masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, karena tingkat kesehatan memiliki keterkaitan yang erat dengan kemiskinan. Sementara itu, tingkat kemiskinan akan terkait dengan tingkat kesejahteraan. Oleh karena kesehatan merupakan faktor utama kesejahteraan masyarakat yang hendak diwujudkan pemerintah, maka kesehatan harus menjadi perhatian utama pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik. Pemerintah harus dapat menjamin hak masyarakat untuk sehat (*right for health*) dengan memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata, memadai, terjangkau dan berkualitas. (Widodo, 2010)

2.1.9 Pengeluaran pemerintah di sektor infrastruktur

Pengeluaran pemerintah di sektor infrastruktur dalam kaitannya dengan pembangunan daerah. Infrastruktur merupakan suatu sarana (fisik) pendukung agar pembangunan ekonomi daerah dapat terwujud. Menurut kajian ilmiah yang dilakukan Friawan (2008) dijelaskan bahwa infrastruktur sangat penting dalam integrasi ekonomi yaitu : *pertama*, ketersediaan infrastruktur yang baik merupakan mesin utama pemicu pertumbuhan ekonomi. *Kedua*, untuk memperoleh manfaat yang penuh dari integrasi, ketersediaan jaringan

infrastruktur sangat penting dalam memperlancar aktivitas perdagangan dan investasi. *Ketiga*, perhatian terhadap perbaikan infrastruktur juga penting untuk mengatasi kesenjangan pembangunan ekonomi antar daerah. Dengan membaiknya infrastruktur diharapkan akan memperlancar mobilitas kerja ekonomi antar daerah yang selanjutnya menarik minat para investor untuk berinvestasi di daerah tersebut, artinya akan menciptakan kesempatan kerja baru karena munculnya unit-unit kegiatan baru. Pada akhirnya perbaikan infrastruktur akan meningkatkan kondisi pembangunan. Meningkatnya kondisi pembangunan akan memberikan efek peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan Ikhsan (2004) bahwa secara langsung pembangunan infrastruktur sendiri merupakan kegiatan produksi yang menciptakan output dan kesempatan kerja. Secara tidak langsung, ketersediaan infrastruktur yang mempengaruhi perkembangan sektor-sektor ekonomi yang lain, terutama infrastruktur dasar yang memberikan produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan infrastruktur lanjutan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap tingkat kemiskinan telah dilakukan oleh banyak peneliti. Penelitian-penelitian sejenis yang menjadi referensi dan inspirasi dalam penelitian ini secara ringkas sebagai berikut:

1. Hermien Triyowati (2004) melakukan penelitian yang berjudul “Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan

Tingkat Kemiskinan: Suatu Kajian Atas Investasi Pemerintah Daerah Bidang Infrastruktur, Pertanian, Pendidikan dan Kesehatan (Studi Kasus Provinsi Banten Tahun 2001-2003). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Provinsi Banten, khususnya berkaitan dengan dengan dampak kebijakan desentralisasi fiskal dalam bentuk investasi pemerintah di bidang infrastuktur, pertanian, pendidikan dan kesehatan terhadap penyerapan tenaga kerja dan tingkat kemiskinan. Model yang digunakan adalah Model Ekonometrika Persamaan Regresi Linear Berganda :

Persamaan Umum : $Y_{Tk} \ Y_{Kmn} = f(X_{inf}, X_{isp}, X_{ipen}, X_{ikes})$

$$Y_{Tk} = \beta_0 + \beta_1 X_{Inf} + \beta_2 X_{Isp} + \beta_3 X_{Ipen} + \beta_4 X_{Ikes} + \mu_2$$

$$Y_{Kmn} = \beta_{01} + \beta_5 X_{Inf} + \beta_6 X_{Isp} + \beta_7 X_{Ipen} + \beta_8 X_{Ikes} + \mu t$$

Dimana :

Y_{Tk} = jumlah tenaga kerja (jiwa)

Y_{Kmn} = jumlah penduduk miskin (jiwa)

X_{Inf} = investasi infrastuktur (000 Rp)

X_{Isp} = investasi pertanian (000 Rp)

X_{Ipen} = Investasi pendidikan (000 Rp)

X_{Ikes} = Investasi kesehatam (000 Rp)

$\beta_0, \beta_1, \dots, n$ merupakan parameter estimasi

μt merupakan Error term (variabel yang tidak terkorelasi).

Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengeluaran sektor infrastruktur berdampak positif terhadap jumlah tenaga kerja dan tidak mempunyai dampak terhadap tingkat kemiskinan. Pengeluaran di sektor

pertanian tidak mempunyai dampak terhadap jumlah tenaga kerja dan berdampak positif dan nyata terhadap tingkat kemiskinan. Pengeluaran di sektor pendidikan tidak mempunyai dampak terhadap jumlah tenaga kerja maupun tingkat kemiskinan. sedangkan pembangunan di sektor kesehatan tidak mempunyai dampak terhadap jumlah tenaga kerja maupun tingkat kemiskinan.

2. Susilo Bambang Yudhoyono melakukan penelitian yang berjudul “Pembangunan Pertanian dan Perdesaan Sebagai Upaya Mengatasi Kemiskinan dan Pengangguran: Analisis Ekonomi-Politik Kebijakan Fiskal”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penerapan kebijakan fiskal, terutama untuk pengeluaran pemerintah terhadap pengangguran dan kemiskinan dengan menggunakan data seluruh provinsi di Indonesia selama periode tahun 1984-2003. Model yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model persamaan simultan yang bersifat dinamik dan dirumuskan dalam bentuk *linear additive*, yang terdiri dari 22 persamaan struktural dan 9 persamaan identitas. Model ini diduga dengan persamaan 2SLS. Hasil pendugaan parameter kemudian digunakan untuk melakukan skenario-skenario kebijakan yang relevan. Hasil dugaan model menunjukkan bahwa rejim pemerintahan berpengaruh nyata terhadap kinerja perekonomian, khususnya PDB dan kemiskinan. Kondisi ekonomi-politik yang ditimbulkan oleh rejim pemerintahan orde baru cenderung menurunkan PDB pertanian dan non-pertanian. Akibatnya kemiskinan di perdesaan dan perkotaan cenderung

meningkat. Hasil simulasi menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah untuk pembangunan infrastruktur berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi kemiskinan. Selain itu, studi Yudhoyono menemukan bahwa untuk mengurangi kemiskinan, khususnya di perdesaan, diperlukan policy mix antara pengeluaran pemerintah untuk pembangunan pertanian dan kebijakan upah.

3. Muana Nanga (2005) melakukan penelitian yang berjudul “Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Kemiskinan di Indonesia : Suatu Analisis Simulasi Kebijakan”. Nanga menyatakan bahwa kemiskinan masih merupakan masalah yang serius dan memiliki keterkaitan yang erat dengan pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan. Kebijakan desentralisasi fiskal yang dilakukan melalui transfer fiskal merupakan salah satu kebijakan pemerintah, yang langsung ataupun tidak langsung dapat memberikan dampak terhadap kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan dan menganalisis dampak transfer fiskal terhadap kemiskinan. Nanga mengambil sampel dari 25 provinsi di Indonesia mulai tahun 1999-2002 dengan menggunakan pendekatan ekonometrika. Model transfer fiskal dan kemiskinan yang dibangun terdiri dari enam blok persamaan yaitu: fiskal, output, tenaga kerja, pengeluaran perkapita, distribusi pendapatan, dan kemiskinan. Hasil studi Nanga menunjukkan bahwa transfer fiskal di Indonesia memiliki dampak yang cenderung

memperburuk ketimpangan pendapatan dan kemiskinan, dan kemiskinan ternyata sangat dipengaruhi oleh ketimpangan pendapatan.

4. Usman (2006) melakukan penelitian ini yang bertujuan untuk mengevaluasi dampak kebijakan desentralisasi fiskal terhadap kinerja fiskal dan ekonomi daerah yang lebih ditekankan pada distribusi pendapatan dan tingkat kemiskinan di Indonesia. Ruang lingkup penelitian ini adalah wilayah Indonesia dengan 308 Kabupaten/Kota dan didisagregasi menjadi 26 provinsi. Data yang digunakan tahun 1994-2003 yang terdiri dari data yang digunakan untuk mengevaluasi dan membandingkan pertumbuhan masyarakat ekonomi bawah dan atas, data *cross section* rumah tangga tahun 1999 dan 2002 untuk mengetahui faktor-faktor penentu kemiskinan, dan data panel tahun 1995 sampai tahun 2003 untuk menganalisis dampak desentralisasi fiskal terhadap perubahan distribusi pendapatan dan tingkat kemiskinan. Pada penelitian ini, Usman menggunakan pendekatan ekonometrika dengan empat blok yaitu: blok Penerimaan daerah, Pengeluaran daerah, Permintaan agregat, Distribusi pendapatan dan Kemiskinan. Keempat blok tersebut membentuk sistem persamaan (simultan) dengan 17 persamaan struktural dan 8 persamaan identitas. Untuk menganalisis distribusi pendapatan dan kemiskinan digunakan Indeks Gini dan Indeks kemiskinan.

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

Peneliti	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Variabel penelitian	Hasil/ Kesimpulan
1.Hermien Triyowati (2005)	Menganalisis tentang diterapkannya pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Provinsi Banten, khususnya berkaitan dengan dampak kebijakan desentralisasi fiskal dalam bentuk investasi pemerintah di bidang infrastruktur, pertanian, pendidikan, dan kesehatan pada jumlah tenaga kerja dan tingkat kemiskinan.	<p>Analisis penelitian ini menggunakan <i>Multiple Linear Regression Model</i>, dimana digunakan dengan dua model penggunaan ekonometrika yaitu;</p> $Y_{Tk} = \beta_0 + \beta_1 X_{Inf} + \beta_2 X_{Isp} + \beta_3 X_{Ipen} + \beta_4 X_{Ikes} + \mu t$ $Y_{Kmn} = \beta_{01} + \beta_5 X_{Inf} + \beta_6 X_{Isp} + \beta_7 X_{Ipen} + \beta_8 X_{Ikes} + \mu t$ <p>Y_{Tk} = jumlah tenaga kerja (jiwa) Y_{kmn} = jumlah penduduk miskin (jiwa) X_{inf} = investasi infrastruktur X_{isp} = investasi pertanian X_{ipen} = investasi pendidikan X_{ikes} = investasi kesehatan μt = error term</p>	<p>Penelitian ini menggunakan variabel-variabel sebagai berikut:</p> <p>Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ●Penyerapan Tenaga Kerja ●Tingkat kemiskinan <p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ●Pengeluaran pemerintah (Investasi infrastruktur, investasi sektor pertanian, investasi pendidikan dan investasi kesehatan) 	<ul style="list-style-type: none"> ● Pembangunan di provinsi Banten berjalan lambat, dibuktikan oleh peningkatan investasi infrastruktur yang hanya meningkatkan penyerapan tenaga kerja kurang dari satu persen. Selain itu adanya pembangun sektor pertanian yang kurang terarah, berdampak pada semakin bertambahnya tingkat kemiskinan ●Kurang atau belum efektifnya investasi infrastruktur, sektor pertanian, pendidikan dan kesehatan terhadap penyerapan jumlah tenaga kerja dan penurunan tingkat kemiskinan, ini mungkin disebabkan oleh rendahnya nilai investasi atau karena kualitas pelayanan Pemerintah Daerah masih kurang/belum sepenuhnya mendukung proses

				pembangunan
2. Susilo Bambang Yudhoyono (2004)	Menganalisis dampak penerapan kebijakan fiskal, terutama pengeluaran pemerintah terhadap pengangguran dan kemiskinan	Analisis penelitian ini menggunakan pendekatan ekonometrika dengan membangun model sistem persamaan simultan yang terdiri atas 22 persamaan struktural dan 9 persamaan identitas. Model ini diduga dengan menggunakan persamaan 2SLS.	Penelitian ini menggunakan variabel-variabel sebagai berikut: Dependen ● Pengangguran ● Kemiskinan Independen ● Pengeluaran Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> ● Regim pemerintahan berpengaruh nyata terhadap kinerja perekonomian, khususnya PDB dan kemiskinan, kondisi ekonomi-politik yang ditimbulkan oleh regim pemerintahan orde baru cenderung menurunkan PDB pertanian dan non-pertanian, akibatnya kemiskinan diperdesaan dan perkotaan cenderung meningkat. ● Hasil simulasi menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah untuk pembangunan infrastruktur berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi pengangguran. ● Untuk mengurangi kemiskinan, khususnya di perdesaan, diperlukan <i>policy mix</i> antara pengeluaran pemerintah untuk pembangunan pertanian dan kebijakan upah.
3. Muana Nanga	Untuk menganalisis	● Model Transfer fiskal dan	Variabel-variabel yang	● Tranfer fiskal dalam berbagai

(2005)	dampak transfer fiskal terhadap kemiskinan	kemiskinan yang dibangun terdiri dari enam blok persamaan yaitu: fiskal, output, tenaga kerja, pengeluaran perkapita, distribusi pendapatan, dan kemiskinan	digunakan dalam penelitian ini adalah: Dependen •Ketimpangan pendapatan •Kemiskinan Independen •Transfer Fiskal	bentuk memiliki dampak kecenderungan memperburuk kemiskinan di Indonesia •Transfer Fiskal dalam berbagai bentuknya cenderung menguntungkan sektor non pertanian karena dana transfer lebih besar dampaknya pada PDRB dan kesempatan kerja di sektor non pertanian dibandingkan sektor pertanian •Setelah desentralisasi fiskal berjalan, kemiskinan di daerah pedesaan semakin memburuk dan sebaliknya di perkotaan kemiskinan semakin berkurang
4.Usman, Bonar M. Sinaga, Hermanto Siregar (2006)	Untuk menganalisis faktor-faktor determinan kemiskinan sebelum dan sesudah penerapan desentralisasi fiskal.	Pada penelitian menggunakan Model Regresi Logit	Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Dependen •Tingkat Kemiskinan Independen •pengeluaran sektor pertanian,pendidikan ,kesehatan keluarga,kesejahteraan keluarga,infrastruktur	• Pos anggaran untuk pengeluaran yang sangat erat kaitannya dengan kemiskinan atau menjadi faktor penentu (determinan) solusi penanggulangan kemiskinan adalah sektor pertanian, pendidikan, kesehatan keluarga, kesejahteraan keluarga, dan infrastruktur

2.3 Kerangka Pemikiran

Permasalahan besar yang sedang dihadapi di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah adalah terkait dengan masalah tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Oleh karena itu peran pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, khususnya pemerintah daerah untuk mencari solusi dan menguraikan angka kemiskinan. Pengeluaran daerah merupakan cerminan kebijakan pemerintah. Kebijakan desentralisasi fiskal yang dicerminkan dalam pengeluaran daerah yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kebijakan pengeluaran daerah yang dialokasikan untuk menyediakan barang publik yang dibutuhkan oleh masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Von Braun (2002) dikatakan bahwa kesejahteraan masyarakat dilihat dari pemenuhan layanan publik dasar seperti : pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang dianggap memiliki hubungan langsung dengan tingkat kemiskinan di dalam masyarakat. Sehingga pemerintah harus memprioritaskan alokasi anggaran yang dianggap sangat erat kaitannya dengan kemiskinan atau menjadi faktor penentu untuk mengatasi penanggulangan kemiskinan. Pengeluaran tersebut adalah pengeluaran sektor pertanian, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

Pembangunan sektor pertanian sangat penting untuk menanggulangi angka kemiskinan, hal ini dikarenakan bahwa realita menunjukkan bahwa sektor pertanian berkaitan erat dengan masyarakat miskin. Sektor pertanian merupakan sektor yang penting dan strategis karena masyarakat penduduk miskin bekerja di

sektor pertanian dan dapat menyediakan lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja di daerah tersebut.

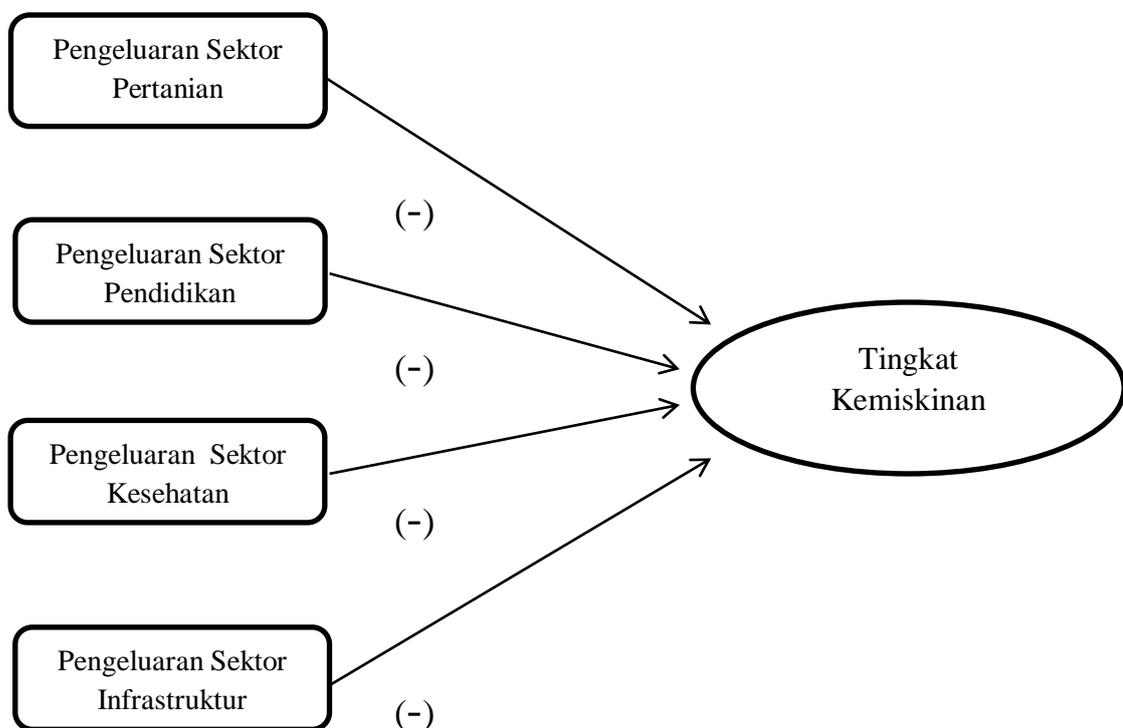
Pendidikan merupakan faktor penting dalam memberantas kemiskinan. Seseorang yang memperoleh tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan memperoleh kesempatan yang lebih baik untuk meningkatkan standar hidupnya. Pengaruh pendidikan tidak hanya mempengaruhi kemampuan individu untuk mendapatkan tingkat pendapatan yang lebih tinggi, melainkan juga dapat mempengaruhi perilaku individu dalam pengambilan keputusan, yang akan meningkatkan kemungkinan sukses dan menjangkau kebutuhan pokok, bahkan pendidikan akan membuat terhindar dari kondisi miskin (Zuluaga, 1990). Rendahnya tingkat pendapatan juga akan berdampak terhadap pada rendahnya kemampuan seseorang mengakses pelayanan kesehatan.

Keterkaitan infrastruktur dalam pembangunan ditunjukkan oleh pertumbuhan output. Kurangnya pembangunan infrastruktur menyebabkan potensi sumber daya di daerah tersebut susah berkembang. Banyak penelitian telah membuktikan bahwa jika pembangunan infrastruktur daerah berkembang dengan baik, terutama infrastruktur jalan, maka akan merangsang peningkatan pendapatan masyarakatnya. Hal ini dikarenakan aktivitas ekonomi daerah ini meningkat akibat semakin tingginya dan semakin mudahnya mobilitas faktor produksi dan aktivitas perdagangan daerah tersebut. Pembangunan infrastruktur juga dapat mempengaruhi dalam menanggulangi angka kemiskinan. Saat pemerintah berusaha untuk mengurangi angka kemiskinan, maka pemerintah perlu melakukan

pembangunan pada sektor infrastruktur dengan memberikan prioritas yang tepat, baik dari segi wilayah, sektor maupun jenis infrastrukturnya.

Secara skematis kerangka pemikiran penelitian dapat disajikan pada gambar 2.3 sebagai berikut:

Gambar 2.3
Kerangka Pemikiran



2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu pernyataan yang bersifat sementara, tentang adanya suatu hubungan tertentu antara variabel-variabel yang digunakan, yang diambil untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam suatu penelitian yang sebenarnya harus diuji secara empiris yang pernah dilakukan berkaitan dengan

penelitian di bidang ini. Maka hipotesis untuk penelitian ini dapat diajukan sebagai berikut:

1. Diduga pengeluaran pemerintah daerah di sektor pertanian berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan periode tahun 2007–2012.
2. Diduga pengeluaran pemerintah daerah di sektor pendidikan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan periode tahun 2007-2012.
3. Diduga pengeluaran pemerintah daerah di sektor kesehatan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan periode tahun 2007–2012.
4. Diduga pengeluaran pemerintah daerah di sektor infrastruktur berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan periode tahun 2007–2012.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah daerah di sektor pertanian, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur terhadap tingkat kemiskinan. Pengeluaran pemerintah daerah dalam bentuk investasi bidang pertanian, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode pengamatan 2007-2012 dijadikan variabel bebas yang diduga mempengaruhi tingkat kemiskinan (variabel terikat) di Provinsi Jawa Tengah. Variabel merupakan objek pengamatan penelitian atau faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa dan fenomena-fenomena yang akan diteliti. Adapun variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel Terikat (dependen)

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Tingkat Kemiskinan (KM)

Tingkat kemiskinan adalah persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan yang merupakan dasar perhitungan jumlah penduduk miskin ditentukan dua kriteria yaitu pengeluaran konsumsi perkapita per bulan yang setara dengan 2100 kalori perkapita per

hari dan nilai kebutuhan minimum komoditi bukan makanan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat kemiskinan, yaitu perbandingan antara jumlah penduduk miskin dengan jumlah penduduk di Provinsi Jawa Tengah tahun 2007 – 2012 (dalam satuan persen).

2. Variabel Bebas (Independen)

Variabel independen (*predictor*) yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

a. Pengeluaran di Sektor Pertanian

Pengeluaran pemerintah di sektor pertanian merupakan besarnya pengeluaran pemerintah daerah untuk sektor pertanian yang mencerminkan pengeluaran pemerintah dari total anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dialokasikan untuk sektor pertanian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah alokasi belanja pemerintah daerah sektor pertanian di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2007 - 2012 (dalam satuan juta rupiah).

b. Pengeluaran di Sektor Pendidikan

Pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan merupakan besarnya pengeluaran pemerintah daerah untuk sektor pendidikan yang mencerminkan pengeluaran pemerintah dari total anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dialokasikan untuk sektor pendidikan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah alokasi belanja pemerintah daerah sektor pendidikan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2007 - 2012 (dalam satuan juta rupiah).

c. Pengeluaran di Sektor Kesehatan

Pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan merupakan besarnya pengeluaran pemerintah daerah untuk sektor kesehatan yang mencerminkan pengeluaran pemerintah dari total anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dialokasikan untuk sektor kesehatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah alokasi belanja pemerintah daerah sektor kesehatan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2007 - 2012 (dalam satuan juta rupiah).

d. Pengeluaran di Sektor Infrastruktur

Pengeluaran pemerintah di sektor infrastruktur merupakan besarnya pengeluaran pemerintah daerah untuk sektor infrastruktur yang mencerminkan pengeluaran pemerintah dari total anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dialokasikan untuk sektor infrastruktur. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah alokasi belanja pemerintah daerah sektor infrastruktur di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2007 - 2012 (dalam satuan juta rupiah).

3.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh berdasarkan informasi yang telah disusun dan dipublikasikan oleh lembaga atau instansi tertentu. Yang bersumber dari laporan Badan Pusat Statistik dan lain-lain khususnya tahun 2007 sampai dengan tahun 2012. Dan jenis data yang

digunakan adalah data Panel (*pooling data*) yaitu gabungan *Time series* dan *Cross Section*. Data Time Series dari tahun 2007 sampai tahun 2012. Objeknya adalah Provinsi Jawa tengah.

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa sumber, yaitu :

1. Data anggaran pengeluaran pemerintah daerah di sektor pertanian dalam APBD di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2007 – 2012 dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
2. Data anggaran pengeluaran pemerintah daerah di sektor pendidikan dalam APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2007 – 2012 dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
3. Data anggaran pengeluaran pemerintah daerah di sektor kesehatan dalam APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2007 – 2012 dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
4. Data anggaran pengeluaran pemerintah daerah di sektor infrastruktur dalam APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2007 – 2012 dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
5. Data tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2007 - 2012 dari hasil Susenas, Badan Pusat Statistik.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data kuantitatif, disamping itu metode pengumpulan data memiliki fungsi teknis guna memungkinkan para peneliti melakukan pengumpulan data sedemikian rupa sehingga angka-angka dapat diberikan pada objek yang diteliti (Anto Dajan, 2000).

Data yang digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya dari diperoleh melalui studi pustaka sebagai metode pengumpulan datanya, sehingga tidak menggunakan teknik sampling serta kuesioner. dengan cara mencari bahan-bahan serta teori-teori pendukung penelitian serta data sekunder dari instansi terkait dalam kurun waktu tahun 2007 - 2012.

3.4 Metode Analisis

Terkadang di dalam penelitian ditemukan adanya persoalan mengenai ketersediaan data untuk mewakili variabel yang akan digunakan dalam penelitian, seperti data dalam series yang pendek dan bentuk data dengan jumlah unit *cross section* yang terbatas. Dalam teori ekonometrika, kedua kondisi tersebut dapat diatasi dengan menggunakan data panel agar dapat diperoleh hasil estimasi yang lebih baik dengan terjadinya peningkatan jumlah observasi yang berimplikasi terhadap peningkatan derajat kebebasan. Menurut Gujarati (2003) dalam Waluyo (2007) kelebihan dengan menggunakan data panel yaitu, antara lain :

- a. Estimasi data panel dapat mempertimbangkan heterogenitas dan memperkenalkan variabel-variabel individu yang lebih spesifik.
- b. Data panel dapat memberikan data yang lebih informatif, lebih bervariasi, kurang kolinearitas antar variabel, derajat bebas yang lebih besar, dan lebih efisien.
- c. Data panel lebih sesuai untuk mempelajari dinamika perubahan.
- d. Data panel dapat secara lebih baik mendeteksi dan mengukur efek yang tidak dapat diamati dalam data *cross section* dan *time series*.
- e. Data Panel dapat digunakan untuk mempelajari model-model perilaku yang kompleks.
- f. Data Panel dapat meminimalisir bias yang mungkin ditimbulkan oleh agregasi data individu.

Menurut Shochrul R. Ajija (2011) menyatakan bahwa metode yang bisa digunakan untuk mengolah data panel, yaitu :

1. *Pooled Least Square* (PLS)

Metode ini dilakukan dengan mengestimasi data panel dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS). Pendekatan PLS ini secara sederhana menggabungkan semua data runtun waktu dan antar ruang, serta berasumsi bahwa baik *intercept* dan *slope* dianggap sama untuk tiap waktu dan individu.

2. *Fixed Effect* (FE)

Metode ini menambahkan model dummy pada data panel. Pendekatan FE ini dengan memperhitungkan kemungkinan bahwa peneliti menghadapi masalah

omitted-variables, yang mungkin membawa perubahan pada intercept runtun waktu atau antar ruang.

3. *Random Effect* (RE)

Metode ini dengan memperhitungkan error dari data panel dengan metode *least square*. Pendekatan RE memperbaiki efisiensi proses *least square* dengan memperhitungkan error dari antar ruang dan runtun waktu. Model RE merupakan variasi dari estimasi *Generalized Least Square* (GLS).

Analisis regresi dengan menggunakan metode panel data digunakan untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pertanian, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur terhadap pengentasan tingkat kemiskinan. Data yang diperoleh akan ditabulasikan dan diolah dengan secara matematik dengan menggunakan program komputer Eviews 6. Model penelitian ini yaitu :

$$Y_{kmn} = f(X_{Isp}, X_{Ipen}, X_{ikes}, X_{Inf}) \dots\dots\dots (3.1)$$

Y_{kmn} = proporsi jumlah penduduk miskin (persen)

X_{isp} = investasi pertanian

X_{ipen} = investasi pendidikan

X_{ikes} = investasi kesehatan

X_{inf} = investasi infrastruktur

Model dasar 3.1 diturunkan menjadi model ekonometrika sebagai berikut :

$$Y_{Kmn} = \beta_0 + \beta_1 X_{Isp} + \beta_2 X_{Ipen} + \beta_3 X_{Ikes} + \beta_4 X_{Inf} + \mu t \dots\dots\dots (3.2)$$

Dimana :

$\beta_0, \beta_1, \dots, \beta_n$ merupakan parameter estimasi

μt merupakan Error term (variabel yang tidak berkorelasi).

Dalam model ini terdiri dari variabel independen (bebas) yang terdiri dari, investasi sektor pertanian, investasi pendidikan, investasi kesehatan dan investasi infrastruktur. Sedangkan sebagai variabel dependen adalah tingkat kemiskinan. Semua variabel-variabel tersebut diukur dengan menggunakan skala ratio, sehingga datanya kontinu. Variabel-variabel tersebut mempunyai penjelasan sebagai berikut :

K_{mn} = Tingkat kemiskinan dalam satuan persen

I_{sp} = Variabel pengeluaran pemerintah sektor pertanian dari APBD dalam satuan juta rupiah

I_{pen} = Variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dari APBD dalam satuan juta rupiah

I_{kes} = Variabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dari APBD dalam satuan juta rupiah

I_{nf} = Variabel pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur dari APBD dalam satuan juta rupiah

3.4.1 Deteksi Penyimpangan Asumsi Klasik

Metode *Ordinary Least Square* (OLS) merupakan metode sederhana yang dapat digunakan untuk melakukan regresi linear terhadap sebuah model. *Ordinary Least Square* juga merupakan metode yang digunakan untuk meminimalkan

penyimpangan hasil perhitungan terhadap kondisi aktual. OLS juga merupakan metode regresi dengan keunggulan sebagai estimator linear terbaik yang tidak bias. Sehingga hasil penghitungan OLS dapat dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan. Namun, untuk menjadikan sebuah estimator yang baik dan tidak bias, terdapat beberapa uji asumsi kalsik yang harus dipenuhi.

Menurut Gujarati (1995) menyebutkan bahwa untuk menjadikan hasil regresi yang memiliki derajat kepercayaan yang tinggi, maka harus terdapat uji asumsi yang digunakan, yaitu :

1. Model persamaan harus berupa linear.
2. Nilai variabel independen harus tetap meskipun dalam pengambilan sampel yang berulang.
3. Nilai rata-rata penyimpangan harus sama dengan nol.
4. *Homocedasticity*.
5. Tidak terdapat autokorelasi antara variabel.
6. Nilai *covariance* harus sama dengan nol.
7. Jumlah observasi harus lebih besar daripada jumlah parameter yang diestimasi.
8. Nilai variabel independen yang bervariasi.
9. Model regresi harus memiliki bentuk yang jelas.
10. Tidak adanya *multicolinearity* antar variabel independen.

3.4.1.1 Deteksi Normalitas

Deteksi normalitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat variabel pengganggu atau residual memiliki hubungan distribusi normal. Untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan uji grafik yaitu dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Menurut (Imam Gozali, 2005) uji normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik. Dasar pengambilan keputusannya yaitu :

- a. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya, hal ini menunjukkan pola distribusi normal, maka model memenuhi asumsi distribusi normalitas.
- b. Jika menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal.

Dan dengan menggunakan uji statistik *Jarque-Bera Test (J-B Test)* yaitu dengan menggunakan hasil residual dan *chi-square probability distribution*, yaitu dengan kriteria pengujian sebagai berikut :

1. Bila nilai JB hitung $>$ nilai X^2 tabel, maka H_0 yang menyatakan residual, ut adalah berdistribusi normal ditolak.
2. Bila nilai JB hitung $<$ nilai X^2 tabel, maka H_0 yang menyatakan residual, ut adalah berdistribusi normal diterima.

3.4.1.2 Deteksi Multikolinieritas

Deteksi multikolinieritas merupakan hubungan linear yang sempurna atau pasti diantara beberapa atau semua variabel independen dalam model regresi. Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi baik maka seharusnya tidak ada korelasi tinggi antar variabel bebas. Bila terjadi adanya hubungan linear yang sempurna diantara beberapa atau semua variabel bebas dari suatu model regresi, maka dapat diindikasikan terdapat masalah multikolinieritas. Masalah multikolinieritas mengakibatkan adanya kesulitan untuk dapat melihat pengaruh antar variabel. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas dapat dilakukan dengan menggunakan *auxiliary regression* untuk mendeteksi adanya multikolinieritas. Kriterianya adalah jika R^2 regresi persamaan utama lebih besar dari R^2 *auxiliary regressions* maka dalam model tidak terdapat multikolinieritas.

3.4.2 Pengujian Model

Setelah mendapatkan parameter estimasi, langkah selanjutnya adalah melakukan berbagai macam pengujian terhadap parameter estimasi tersebut, seperti pengujian ekonometrik, statistik, dan ekonomi. Pengujian ekonometrik yang dimaksud adalah untuk mengestimasi parameter regresi dengan menggunakan *Ordinary Least Square* (OLS). Sedangkan pengujian statistik meliputi uji R^2 , uji F, uji t dan evaluasi model dengan memilih pendekatan-pendekatan analisa model data panel serta uji asumsi klasik.

3.4.2.1 Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk memilih antara metode pendekatan *Fixed Effect (FE)* atau metode *Random Effect (RE)*. Prosedur uji Hausman sebagai berikut:

- a. Membuat hipotesis dari uji Hausman : $H_0 = \text{random effect}$ dan $H_1 = \text{fixed effect}$.
- b. Menentukan kriteria uji: apabila *Chi-square* hitung $>$ *Chi-square* tabel dan *p-value* signifikan, maka hipotesis H_0 ditolak, sehingga metode *FE* lebih tepat untuk digunakan. Dan apabila *Chi-square* hitung $<$ *Chi-square* tabel dan *p-value* signifikan, maka hipotesis H_0 diterima, sehingga metode *RE* lebih tepat untuk digunakan.

3.4.2.2 Uji Chow Test

Uji Chow digunakan untuk memilih apakah model yang digunakan *Pooled Least Square* atau *Fixed Effect*. Prosedur Uji Chow adalah sebagai berikut hipotesa :

- a. Membuat hipotesa dari uji Chow
 - H_0 : *Model Pooled Least Square (Restricted)*
 - H_1 : *Model Fixed Effect (Unrestricted)*
- b. Menentukan kriteria uji
 - Jika nilai Chow statistics (F Stat) $>$ F tabel, maka hipotesis H_0 ditolak yang artinya kita harus menggunakan model *fixed effect*.
 - Jika nilai Chow statistics (F Stat) $<$ F tabel, maka hipotesis H_0 diterima, yang artinya kita harus menggunakan model *pooled least square*

3.4.2.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) menunjukkan besar distribusi dari variabel independen terhadap variabel dependen. Koefisien determinasi adalah proporsi variasi dalam Y yang diterangkan oleh pengaruh linier X. Untuk memperoleh R^2 dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$R^2 = \frac{ESS}{TSS}$$

Dimana : ESS = Jumlah kuadrat error

TSS = Jumlah kuadrat total

R^2 berada diantara 0 dan 1. Bila nilai koefisien determinasi (R^2) mendekati angka 1, berarti variabel independen semakin mendekati hubungan dengan variabel dependen, sehingga pengaruh model tersebut dapat dikatakan benar. Jadi, semakin besar nilai dari R^2 , maka semakin bagus garis regresi yang terbentuk dan semakin kecil nilai dari R^2 , maka semakin tidak tepat garis regresi tersebut mewakili data hasil observasi. Hal ini diperlukan karena dalam suatu penelitian atau observasi, perlu dilihat seberapa jauh model yang terbentuk dapat menerangkan dependen variabelnya.

3.4.2.4 Uji Signifikansi Individual (Uji t)

Uji t bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas secara individual dalam menjelaskan variasi variabel tak bebas. Uji ini dilakukan dengan membandingkan antara t hitung dengan t tabel. Rumus untuk memperoleh nilai t hitung adalah:

$$t \text{ hitung} = \frac{\beta_i}{se(\beta_i)}$$

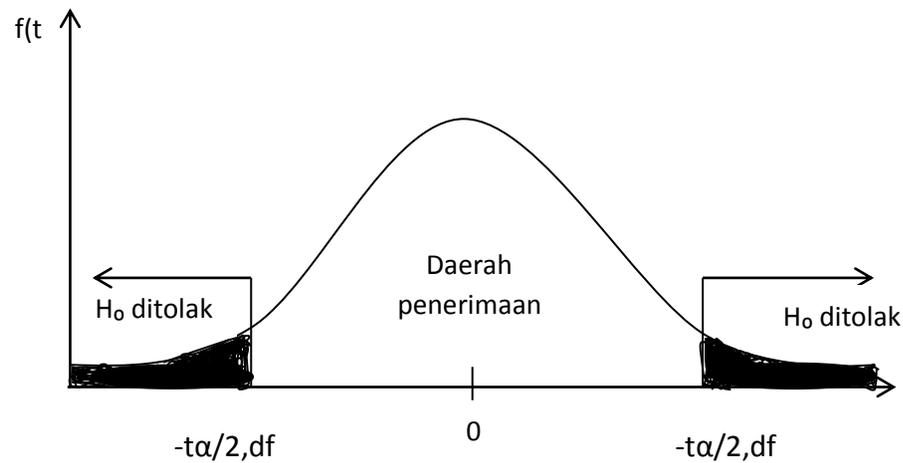
dimana:

β_i = koefisien regresi

se = standar error

Dasar pengambilan keputusan :

1. Dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel :
 - a. Apabila t hitung > t tabel, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya ada pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.
 - b. Apabila t hitung < t tabel, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.



Gambar 3.1 Daerah kritis dan penerimaan suatu hipotesis

Dalam gambar di atas terlihat bahwa hipotesis nol diterima bila berada dalam selang keyakinan ($-t_{\alpha/2, df} < t_{stat} < t_{\alpha/2, df}$) yang berarti variabel independen tidak signifikan dalam mempengaruhi variabel dependen, dan begitu pula sebaliknya.

3.4.2.5 Uji Signifikansi Simultan (Uji-F)

Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas dalam penelitian yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel tak bebas. Hipotesis yang hendak di uji adalah apakah semua parameter dalam model sama dengan nol. Mekanisme yang digunakan untuk menguji hipotesis dari parameter dugaan secara bersama-sama (uji F-statistik) :

Hipotesa : $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_k = 0$

H_1 : minimal ada satu parameter dugaan (β_1) yang tidak sama dengan nol

Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Untuk memperoleh F hitung dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\mathbf{F \ hitung} = \frac{\mathbf{R^2/(k-1)}}{\mathbf{(1-R)/(N-k)}}$$

Dimana:

R^2 = koefisien determinasi

N = jumlah pengamatan/sampel

k = jumlah parameter yang diestimasi termasuk konstanta

Pengambilan keputusan diambil pada tingkat signifikan (α)= 5% dengan pengujian sebagai berikut :

- Jika $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya ada pengaruh dari seluruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.
- Jika $F\text{-hitung} < F\text{-tabel}$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya tidak ada pengaruh dari seluruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.